

SENATOR



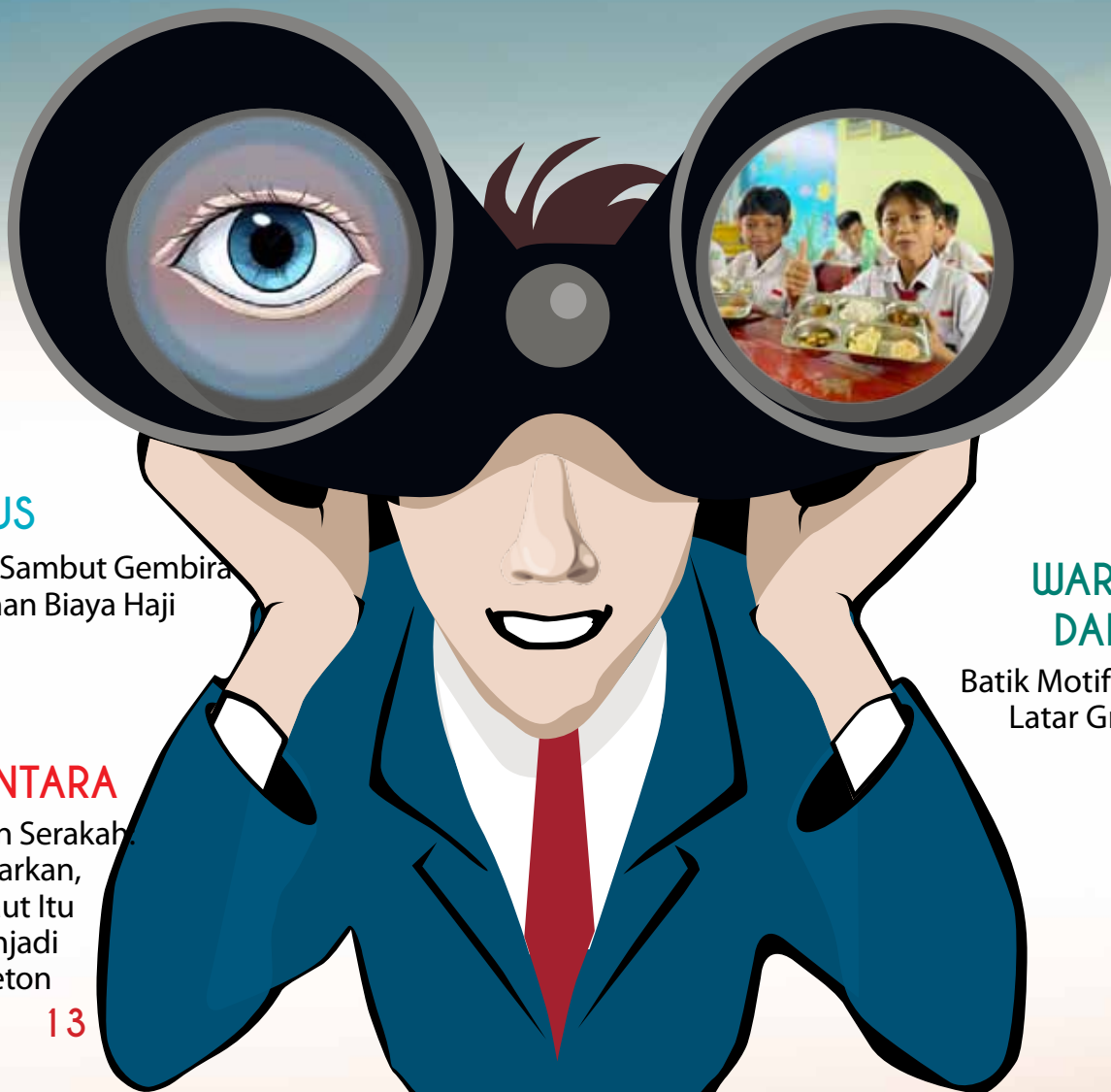
ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI II / JANUARI 2025



KHUSUS

Senator Sambut Gembira
Penurunan Biaya Haji
2025

6

NUSANTARA

Tindakan Serakah,
Bila Dibiarkan,
Pagar Laut Itu
Bisa Menjadi
Pagar Beton

13

SEKRETARIAT JENDERAL

Perlu Sinergitas DPD RI
dengan Media
di Daerah

49

WARISAN DAERAH

Batik Motif Dayak
Latar Grinsing

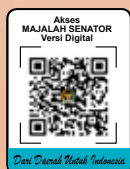
52

GAGASAN

Ketahanan Nasional
Prasyarat Indonesia
Emas 2045

62

AWASI PROGRAM MBG!



Program MBG dan Pengawasan DPD RI

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah strategis dalam persiapan sumber daya manusia Indonesia untuk masa depan. Program ini menggambarkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, namun menghadapi kendala serius yang dapat menghambat potensinya. DPD RI, sebagai lembaga representatif daerah, harus memainkan peran kritis dalam mendukung dan mengawasi program ini untuk memastikan bahwa tidak ada sekolah atau kelompok masyarakat yang terlewatkan karena keterbatasan anggaran.

Penggunaan dana pribadi oleh Presiden Prabowo dalam program ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama tentang bagaimana pertanggungjawabannya. Sebab, kita harus bisa memastikan bahwa setiap biaya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan ini tidak hanya akan membangun kepercayaan publik tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

Selain soal transparansi tentang penggunaan anggaran, kita melihat bahwa anggaran yang tersedia atau yang sudah dialokasikan belum mencukupi kebutuhan semua sekolah di tanah air. Karena itu, perlu dicari langkah-langkah strategis dalam hal

melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, misalnya, mengusulkan untuk memobilisasi dana masyarakat melalui zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZIS) – tentu di luar yang dilakukan Baznas—namun tetap dengan pengawasan ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi distribusinya.

Aspek lain, soal kehalalan produk dalam program MBG juga krusial, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Di sinilah DPD RI bisa ikut andil memastikan bahwa semua makanan yang disediakan dalam program ini memiliki label halal yang tepat, untuk menghindari ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan memperkuat integritas program.

Pengawasan yang tegas dan bertanggung jawab akan menentukan keberhasilan program MBG ini. DPD RI harus secara aktif mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program di setiap daerah, memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan sesuai harapan tetapi juga benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan dedikasi dan pengawasan yang komprehensif, program MBG diharapkan dapat menjadi katalis dalam mendorong kemajuan bangsa.

(* /Adhi Nugroho)

SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **PENANGGUNGJAWAB:** Mahyu Darma
PEMIMPIN REDAKSI: Heru Firdan; **REDAKTUR PELAKSANA:** Budi Fitra Helmi; **REDAKTUR FOTO & GRAFIS:** Agus Wiharto; **EDITOR SENIOR:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **TIM PENULIS ARTIKEL:** Heru Firdan, Budi Fitra Helmi, Intan Fitria Yuliani, Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sa'diah

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6 Jakarta Pusat 10270. Email : keranjangsenator@gmail.com Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id // website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

Free Nutritious Food (MBG) Program and Supervision of DPD RI

Free Nutritious Food (MBG) program initiated by President Prabowo Subianto is a strategic step in preparing future Indonesian human resources. It depicts the commitment of the government toward the prosperity of the people, yet it is facing a serious hindrance which may block its potential. DPD RI as a house of representatives toward the regions has to play its critical role in supporting and supervising this program in order to ensure that neither any school nor any society be bypassed due to limited budget.

The use of personal fund by President Prabowo in the program certainly raises questions among the people, especially related to the accountability aspect. It is because we have to be able to ascertain that every cost is properly used with accountability. The transparency will not only build public trust but also enhance the effectiveness of budget utilization.

Besides transparency issue of budget utilization, we notice that the available or allocated budget is still insufficient to cater for the needs of all schools across the country. Therefore, it is necessary to set strategical steps in involving the community to participate. The Chairman of DPD

RI, Sultan B. Najamudin for instance, suggests to raise funds from the community through zakat, infaq, shadaqah, and wakaf (ZIS) – apart from the program of Baznas – with close monitoring to ensure justice and transparency in its distribution.

Another crucial aspect is concerning kosher products in the MBG program, particularly in Muslim-majority population like Indonesia. Here DPD RI can partake in ascertaining that all foods provided in the program have been appropriately labelled kosher in order to avoid community upset while upholding the program integrity.

Firm and accountable supervision will determine the success of the MBG program. DPD RI has to actively control and evaluate the implementation of the program in every region in order to ensure that it is not only running accordingly to expectation but it is also achieving the designated goal to improve the quality of man-power resources in Indonesia. With dedication and comprehensive supervision, the MBG Program is expected to be a catalyst to boost the nation development. (/Adhi Nugroho)*

SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ADVISOR BOARD: Rahman Hadi, Lalu Niqman Zahir, Oni Choiruddin; **NEWS IN CHARGE:** Mahyu Darma **EDITOR-IN-CHIEF:** Heru Firdan; **MANAGING EDITOR:** Budi Fitra Helmi; **PHOTO & GRAPHICS EDITOR:** Agus Wiharto; **SENIOR EDITORS:** Intan Fitria Yuliani, Arso P Nugroho; **GRAPHIC DESIGNER & PHOTOGRAPHER:** Subbagian Media Setjen DPD RI; **ARTICLE WRITER:** Arso Pranoto Nugroho, Helena Agustina Fernandez Ojan, Muhamad Fathoni, Theresia Oktavina, Betria Eriani, Didin Saputra, Mas Aryo Kristiyanto, Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari, Rini Sumarni, Nanda Russia Rola, Adhi Nugroho, Lela Sa'diah.

EDITORIAL OFFICE News and Media Division, 1st Floor, Building B, DPD RI, Jl Gatot Subroto No 6, Central Jakarta 10270.
Email: keranjangsenator@gmail.com Suggestions Box: majalah_senator@dpd.go.id // website: www.dpd.go.id // IG: @dpdri // FB: www.facebook.com/DPDRI // X @dpdri

AWASI PROGRAM MBG!



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan Yorrys Raweyai saat memimpin Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/25).

Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mencanangkan dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini dinilai sangat penting untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Karena itu, DPD RI siap ikut mengawasi.

Arso P Nugroho

Penulis

Program besutan dan salah satu andalan pemerintahan Prabowo Subianto itu menyedot perhatian publik karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara kelembagaan dan merupakan lembaga representasi rakyat dan daerah mendukung penuh program pemerintah tersebut.

Karena itu, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengajak semua pihak turut berpartisipasi untuk mengawasi program ini agar berjalan sesuai harapan. “DPD RI melalui Komite III akan mengawasi kesiapan di daerah dalam pelaksanaan program MBG maupun menemukan potensi-potensi penyelewengan dari permasalahan di kemudian hari,” kata Sultan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/25).

Sementara itu, dari laporan hasil penyerapan masyarakat di daerah yang dilakukan anggota DPD RI, masih ditemukan berbagai

persoalan dalam pelaksanaan program MBG tersebut. Seperti dilaporkan Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow. Program MBG di Provinsi Sulawesi Utara belum semuanya merasakan. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menyukseskan program ini.

Senada dengan Stefanus, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Timur Lia Istifhama menilai program MBG di Jatim mengalami beberapa kendala, salah satunya anggaran dan belum menyentuh ke pondok pesantren. Ia juga berharap program ini juga bisa menggendong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Hasby Yusuf mendukung program MBG. Namun ia menilai bahwa makan bergizi itu perlu memperhatikan aspek kehalalannya dan pemerataan di setiap sekolah. “MBG sangat penting tapi yang perlu diperhatikan adalah aspek kehalalannya. Karena selama ini belum ada label halalnya,” katanya. (*)

Pemerintah Perlu Ajak Pelaku UMKM Disabilitas



Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam pertemuan dengan sejumlah kepala dinas Pemprov DIY. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, mengapresiasi dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025. Namun, dia mengingatkan agar dalam program tersebut jangan melupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama disabilitas dan perempuan.

“Kita perlu bersama-sama membangun bangsa ini. Program Makan Bergizi Gratis ini perlu kita dukung bersama-sama. Program ini harus lahir dari akar rumput dan karena itu, pemerintah perlu mengajak pelaku UMKM, khususnya perempuan dan disabilitas untuk berkolaborasi,” jelas GKR Hemas.

Hal ini disampaikan GKR Hemas dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM

DIY Nurkyatsiwi; Kabid Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM DIY Wisnu Hermawan; Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Kepala Badan Promosi Pariwisata DIY; serta pelaku UMKM disabilitas yang tergabung dalam Difabike dan anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DIY, di Kantor DPD RI DIY, Selasa (7/1/2025).

Dalam forum tersebut, Ratu Hemas melakukan inventarisasi materi terkait Pemberdayaan UMKM Disabilitas dan Wanita Pengusaha untuk Pembangunan Ekonomi Daerah dengan melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah. “Gerakan ini harus kita mulai dari masyarakat, misalnya melibatkan Ibu PKK yang didorong untuk bisa menghasilkan makanan sehat, mulai dari tingkat desa, kelurahan, dan kabupaten. Mari kita sama-sama bekerja untuk pemerintahan yang baru dan bersama-sama membangun bangsa,” kata Ratu Hemas.

Ratu Hemas menekankan

bahwa UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di daerah DIY. Selain sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal, UMKM juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Triyono dari Difabike menjelaskan bahwa di Yogyakarta sudah banyak program pemerintah khususnya untuk pelaku UMKM disabilitas. Namun menjadi PR bersama tentang keberlangsungan dari program tersebut. Difabike sudah berdiri sejak 2014 dan memberikan berbagai layanan bagi konsumen dalam hal jasa transportasi.

Sedangkan IWAPI menyatakan sangat siap untuk diajak berkolaborasi. Mereka juga berharap dan menyampaikan kepada Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang dalam hal ini juga sebagai Dewan Pembina IWAPI, untuk terus mengawal kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi yang lebih inklusif. (*)

Perlu Diintegrasikan dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Arso P Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, Hartono, memberikan perhatian khusus terhadap program pemerintah berupa Makan Bergizi Gratis yang telah digulirkan di beberapa wilayah, termasuk Papua Barat Daya.

Program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya itu, dinilai Hartono merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi angka gizi buruk yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. “Pro-

gram MBG ini harus menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di daerah terpencil yang sulit diakses,” katanya, dikutip dari wawancaranya dengan RRI Sorong, Kamis (9/1/2025).

Ia juga

menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini agar berjalan efektif. Distribusi bahan pangan juga harus tepat waktu dan sesuai standar kualitas. Pemerintah daerah juga diminta perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.

Selain itu, anggota Komite III ini mengusulkan agar program ini tidak hanya menjadi langkah sementara, melainkan diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Jika masyarakat dilibatkan dalam proses penyediaan bahan pangan, seperti hasil pertanian lokal, program ini juga dapat memberikan dampak ekonomi yang positif,” jelasnya.

Melalui pengawasan dan dukungan dari DPD RI, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Papua Barat Daya dan wilayah lainnya di Indonesia.

(*)



01

02

03

04

05

06

06

Anggota DPD RI Daya Hartono saat dialog dengan RRI Sorong. (Foto RRI)

Teras Narang Berharap Kalteng Jadi Percontohan



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang dalam kunjungannya ke Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah. (Foto Disdik Kalteng)

M Fathoni

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah. Hanya saja, dia menyayangkan daerah pemilihannya tidak menjadi daerah percontohan.

“Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, sudah siap dari sisi infrastruktur dan mudah dimonitor oleh gubernur maupun kepala dinas pendidikan. Saya berharap pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada Kalimantan Tengah sebagai daerah percontohan program ini,” kata Teras Narang saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi

Kalteng, Senin (6/1/2025).

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan program MBG. Program ini dirancang untuk mendukung siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan seperti pesantren dan yayasan Nasrani.

Dia mengutip data dari Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun secara nasional, namun Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat belum terpilih sebagai lokasi pilot project. “Kami pada prinsipnya siap, baik dari sarana prasarana, anggaran, maupun sumber daya manusia. Kami hanya menunggu arahan lebih lanjut dari pusat,” jelas

Reza.

Dia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kalteng Sugianto Sabran telah mengarahkan agar pembangunan dapur atau SPPG di Palangkaraya memanfaatkan aset pemerintah daerah. Rencananya, akan dibangun 2-3 unit sebagai tahap awal percobaan, dengan anggaran yang telah disiapkan dari APBD Provinsi Kalteng. “Kami mendukung penuh program presiden. Kalimantan Tengah siap menjalankan ini sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” pungkas Reza.

Dengan kesiapan Kalimantan Tengah ini, dia berharap mampu menarik perhatian pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan kepada Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan program strategis nasional berupa Makan Bergizi Gratis tersebut. (*)

Anggota DPD RI David Harold Waromi saat melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong. (Foto Pemprov. Papua)



Tiap Daerah Butuh Anggaran Berbeda

Nanda Russia Rola

Penulis

Dicanangkannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 6 Januari 2025 lalu, betul-betul menyedot perhatian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar program andalan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia itu bisa terlaksana dengan sukses.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua, David Harold Waromi, misalnya, melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, Kamis (9/1/2025). Pertemuan

tersebut khusus membahas persiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, David meminta Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan data terkait program MBG tersebut. Mulai dari jumlah penerima manfaat, anggaran, dan konsep mekanisme pendistribusian ke sekolah-sekolah. “Terkait anggaran ini penting karena setiap kabupaten/kota di Papua tentu kebutuhannya berbeda-beda. Termasuk pendistribusian dari satu tempat ke tempat lain, itu harus didesain untuk memudahkan pendistribusian,” kata David.

Lanjutnya, data tersebut nantinya akan dipaparkan

dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara alat kelengkapan DPD RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Rencananya RDP akan digelar beberapa hari ke depan.

“Tadi Pak Gubernur sudah bilang akan menyiapkan semua data segera. Beliau juga sampaikan kalau bisa gereja, masjid, atau lembaga lainnya dilibatkan agar memudahkan pelaksanaan program ini,” ungkap David.

David pun menyatakan kesiapan untuk mengawal pelaksanaan program MBG ini agar bisa segera berjalan di Papua. “Kami DPD Perwakilan Papua ingin memastikan itu dan membantu pemerintah daerah,” ujarnya. (*)

Masalah Anggaran MBG Jangan Terhenti

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan terhenti di tengah jalan karena menyangkut masalah anggaran, dan hanya sekadar pemenuhan janji kampanye Prabowo Subianto pada Pemilu 2024 lalu.

“Karena ini sudah menempel di memori masyarakat, khususnya para orang tua siswa, bahwa program ini akan berjalan terus. Saya khawatir karena anggaran Rp71 triliun itu tidak akan bisa meng-cover selama satu tahun. Terbukti perkiraannya hanya sampai Juni tahun ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Pasti perlu tambahan anggaran. Mau ambil dari mana lagi?,” kata Filep dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

Filep menyatakan hal itu menanggapi pernyataan Juru Bicara Istana Kepresidenan sebagaimana dilansir dari detik.com, Senin (6/1/2025), yang mengklaim uang pribadi Presiden Prabowo Subianto digunakan untuk program makan siang gratis. Menurut Filep, hal ini menjadi problematik dan bukan sekadar masalah sederhana.

“

Karena ini sudah menempel di memori masyarakat, khususnya para orang tua siswa, bahwa program ini akan berjalan terus. Saya khawatir karena anggaran Rp71 triliun itu tidak akan bisa meng-cover selama satu tahun. Terbukti perkiraannya hanya sampai Juni tahun ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Pasti perlu tambahan anggaran. Mau ambil dari mana lagi?.

”

Ketua Komite III DPD RI,
Filep Wamafma

Senator dari Papua Barat ini meminta pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) agar mengantisipasi keberlanjutan program MBG tersebut. “Untuk memastikan supaya program ini tidak berhenti di tengah jalan, selaku pimpinan Komite III, saya meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pemda dalam hal pembenahan data anak-anak sekolah dan ibu

hamil. Kesesuaian data ini menjadi dasar guna menghindari potensi penyelewengan atau korupsi,” jelasnya.

Kemudian perlu adanya kerja sama dalam hal pengawasan terkait jenis makanan, kualitas dan kuantitasnya. Masyarakat protes juga kalau tiba-tiba tidak ada susu, lalu muncul pembelaan bahwa susu bisa diganti ini dan itu. Ruang pengawasan ini menjadi ranah di lapangan. Se jauh ini SOP-nya belum jelas seperti apa.

Terkait penggunaan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai program MBG tersebut, Filep menegaskan penggunaan uang pribadi presiden selaku pejabat negara telah menyimpang dari prinsip pengelolaan keuangan negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. (*)

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bisa Digunakan Buat Program MBG

Theresia Oktavina

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jawa Timur Lia Istifhama, menyampaikan hasil pemantauannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mencatat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, terutama masalah anggaran.

“Masalah anggaran ini terkait dengan ketersediaan anggaran di daerah, di mana beberapa daerah belum menerima anggaran tersebut. Namun tetap melaksanakannya sesuai dengan kelompok sasaran. Hal ini tentu bisa diantisipasi melalui skema sharing anggaran,” kata Lia dalam Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun 2024-2025, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Senator yang akrab disapa dengan Ning Lia itu menilai nominal Rp10.000 untuk satu porsi MBG bukanlah angka yang cukup di banyak daerah jika harus memenuhi semua kebutuhan gizi. Kecuali, kata dia, jika ada strategi khusus, seperti menyesuaikan porsi menu dengan harga.

Menurutnya, untuk memenuhi program MBG se-



Anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

cara tepat dan optimal, tentu bisa terlaksana jika daerah memiliki keberdayaan ekonomi. Dia mencontohkan dengan Provinsi Jawa Timur. Jika skema otonomi daerah diterapkan dengan lebih adil terkait proporsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), maka kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan semakin kuat dalam memaksimalkan pelaksanaan program MBG.

“Pada intinya, penting sekali upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain DBHCHT juga bisa dilakukan melalui pengkajian kembali pemberlakuan skema opsi pajak kendaraan bermotor, serta pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut dalam batas 0-12 mil agar

sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Semua ini tentu bagian dari peningkatan pendapatan asli daerah dan sekaligus sistem pendukung dalam penguatan Aksara Cita Presiden Prabowo Subianto,” kata Ning Lia.

Tak kalah penting menurut dia adalah pengawasan dari program MBG. Pengawasan yang dimaksud, antara lain terkait kebersihan atau higienitas dapur sehat serta larangan penggunaan wadah plastik, melainkan harus dengan wadah yang bisa dicuci dan dipakai ulang, kemudian pengawasan terhadap menu yang sesuai dengan gizi dan tidak basi. Karena jika gizi terlihat lengkap tapi ternyata ada yang basi, maka itu justru akan menimbulkan masalah baru. (*)

Wawancara Ketua DPD RI Sultan B Najamudin:

Partisipasi Pembiayaan MBG Bisa seperti Zakat dan Infak

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyadari bahwa pemerintah masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, diperlukan partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat. Berikut wawancara dengan Sultan.

Apa yang mendasari kekhawatiran Anda terhadap pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Pemerintah saat ini memang masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih besar untuk menyukseskan program MBG. Anggaran Rp71 triliun yang ada hanya mencukupi hingga Juni tahun ini. Ini menunjukkan bahwa tanpa sumber pembiayaan tambahan, program ini bisa terhenti, padahal sudah menjadi harapan banyak orang tua siswa di seluruh Indonesia.

Anda mengusulkan zakat, infak, dan sedekah sebagai solusi pembiayaan. Mengapa memilih metode ini?

Di Indonesia, banyak masyarakat kelas menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan bantuan makanan kepada anak-anak sekolah. Dengan melibatkan zakat, infak, dan sedekah, kita mengaktualisasikan sifat dermawan bangsa kita untuk mendukung misi kemanusiaan yang sangat penting ini. Program MBG tidak hanya sekadar program pemerintah, tapi juga misi sosial yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa.

Bagaimana cara memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan?

Sangat penting untuk menyiapkan

sistem yang akuntabel dan transparan dalam mengelola dana yang terkumpul dari ZIS (di luar Baznas). Pemerintah harus mampu menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif dan terbuka, yang memungkinkan setiap sen yang terkumpul dapat dilacak penggunaannya, memastikan dana tersebut benar-benar terdistribusi untuk tujuan yang sudah ditetapkan.

Apakah ada respons dari organisasi kemasyarakatan mengenai usulan ini?

Kami percaya organisasi kemasyarakatan, khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, akan sangat mendukung. Mereka memiliki jaringan dan kapasitas untuk menggalang dukungan yang lebih luas, memastikan bahwa program ini tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang.

Apa harapan Anda terhadap keberlanjutan program MBG?

Harapan saya adalah program ini bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sosial yang besar. Dengan gotong royong dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan nutrisi yang baik. (*)



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ka'bah dan musim haji. (Foto Kemenag RI)

Senator Sambut Gembira Penurunan Biaya Haji 2025

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DKJ Fahira Idris, memberikan apresiasi atas penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 yang diumumkan oleh pemerintah dan Komisi VIII DPR.

Rini Sumarni

Penulis

Penurunan biaya tahun ini menjadi Rp55,43 juta dari sebelumnya Rp56,045 juta di tahun 2024 mencerminkan komitmen pemerintah dalam meringankan beban finansial calon jemaah serta meningkatkan aksesibilitas ibadah haji. “Penurunan biaya haji



Anggota DPD RI Fahira Idris
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

itu tidak hanya meringankan beban finansial calon jemaah, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan aksesibilitas ibadah haji bagi masyarakat,” ungkap Fahira dalam siaran persnya pada Minggu (12/1/2025).

Menurut Fahira, pelayanan haji yang berkualitas tidak terpengaruh meskipun biaya ditekan lebih rendah. Ia menekankan pentingnya akomodasi, transportasi, konsumsi, dan bimbingan ibadah yang optimal dalam kesuksesan penyelenggaraan haji dan berharap haji 2025 akan berjalan lancar dengan biaya yang lebih efisien.

Senator Jakarta itu juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji, mengingat antrean yang sangat panjang dengan daftar tunggu hingga puluhan tahun di beberapa daerah. “Ada daftar tunggu yang mencapai puluhan tahun di beberapa daerah,” kata Fahira, yang berharap tambahan kuota dapat mempercepat pemberangkatan jemaah.

Fahira mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi guna mewujudkan penambahan kuota. Ia yakin pendekatan proaktif dan argumentasi mengenai besar populasi muslim di Indonesia akan mempercepat realisasi penambahan kuota tersebut.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi tantangan antrean panjang dalam penyelenggaraan haji, memberikan kesempatan lebih luas bagi umat muslim Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima. (*)

Perlu Pertimbangan Matang Pengurangan Durasi Haji

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jelita Donal menanggapi wacana pengurangan masa tinggal haji, yang sebelumnya 41 hari menjadi hanya 30 hari. Usulan ini diajukan dengan tujuan untuk menghemat biaya perjalanan haji serta meningkatkan kualitas fasilitas yang dapat diberikan kepada jamaah.

Jelita Donal mengakui bahwa pengurangan masa tinggal haji dapat menghasilkan penghematan biaya yang cukup signifikan. Namun, perlu dipertimbangkan secara menyeluruh terhadap dampaknya. “Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Kami meminta agar pemerintah lebih bijak dalam merumuskan kebijakan ini dengan memperhatikan dampaknya bagi jamaah,” kata Jelita Donal, Senin (13/1/2025).

Apabila rencana ini

dapat dilaksanakan dengan matang, maka pengurangan durasi tersebut tidak akan menjadi masalah. Percepatan waktu akan menyebabkan kemungkinan, seperti kemungkinan penghilangan kegiatan Arba'in di Madinah. Jika tidak dilaksanakan, maka akan menjadi kehilangan bagi jamaah yang menginginkannya. Untuk itu, dukungan dari MUI kepada Pemerintah akan sangat diperlukan untuk menjaga keabsahan dan kelancaran ibadah agar tetap sesuai dengan tuntutan syariat.

Pengurangan waktu juga akan menyebabkan jadwal kedatangan dan kepulangan jamaah haji menjadi lebih cepat dan bergulir. Petugas haji akan

menghadapi tantangan besar dalam memadatkan jumlah kedatangan dan pemulangan jemaah. Hal ini tentu membutuhkan kesiapan yang ekstra dari petugas haji untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan jamaah selama proses tersebut.

Jelita Donal menekankan pentingnya mengalihkan dana yang terhemat ke sektor-sektor yang dapat langsung meningkatkan kualitas ibadah dan kenyamanan jamaah haji, seperti peningkatan layanan dan fasilitas jamaah atau pengembangan infrastruktur dan teknologi yang mendukung kelancaran ibadah.

Pengalihan biaya harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta tidak mengurangi kualitas pengalaman ibadah jamaah. Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan pengurangan waktu haji ini tidak akan mengurangi kekhusyukan ibadah haji, yang merupakan tujuan utama perjalanan haji bagi umat Islam. (*)



Wakil Ketua Komite III DPD RI Jelita Donal
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pemerintah dan DPR Sepakati Penurunan Biaya Haji 2025

Didin Saputra

Penulis

Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI, dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta pada Senin (6/1/2025), sepakat menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M. Biaya haji reguler rata-rata sekarang adalah Rp89.410.258,79, menurun dari Rp93.410.286,00 pada tahun 2024. Penurunan ini didukung oleh asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.

BPIH terdiri dari dua komponen utama: Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar langsung oleh jemaah dan Nilai Manfaat yang bersumber dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah. Dengan penurunan BPIH, Bipih yang harus dibayar oleh jemaah juga turun, rata-rata menjadi Rp55.431.750,78, atau 62% dari total BPIH. Sementara itu, sisanya, yang sebesar 38% atau Rp33.978.508,01, dialokasikan dari Nilai Manfaat.

Menag Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa keputusan rapat ini akan dijadikan dasar oleh Presiden Prabowo Subiyanto untuk menetapkan BPIH, sesuai dengan Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.



Presiden akan menetapkan besaran BPIH atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 untuk tahun 2025, yang terdiri dari 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing KBIHU. Dari keseluruhan alokasi, terdapat 17.680 jemaah haji khusus.

Total nilai manfaat

yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 adalah sebesar Rp6.831.820.756.658,34, turun Rp1.368.219.881.908,86 dari tahun sebelumnya. Menag berharap penurunan biaya ini disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah terus berupaya agar jemaah juga merasa puas selama penyelenggaraan haji di bulan Juni. (*)

PERKETAT ISTITHA'AH Kesehatan Jemaah Haji

Betria Eriani

Penulis

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI)

Jelita Donal angkat bicara soal wacana Pemerintah Arab Saudi yang akan membatasi usia calon jemaah haji. Pihak otoritas Arab Saudi tidak memberi izin jemaah haji berusia 90 tahun dan akan membatasi jumlah jemaah berusia 70 tahun lebih untuk melaksanakan haji.

“Tentu saja kita akan menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Arab Saudi dalam bentuk formal *letter*. Apa yang tertulis itulah sikap dan aturan yang berlaku. Sebagai tamu yang berkunjung ke rumah orang lain, sesuai adabnya kita harus mematuhi aturan tuan rumah,” kata Jelita Donal baru-baru ini.

Senator asal Sumatera Barat yang lebih akrab disapa dengan nama Buya Jel Fathullah ini mengakui bahwa terjadi trend peningkatan jemaah haji lansia. Namun, pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir berlebihan karena aturan pembatasan usia oleh Pemerintah Arab Saudi dikeluarkan karena alasan kesehatan atau kemampuan fisik jemaah



Ilustrasi jemaah lansia. (Foto Antara)

haji.

Aturan ini justru untuk melindungi jemaah haji. Selain soal kemampuan finansial, kesehatan dan kemampuan fisik juga menjadi syarat melaksanakan ibadah haji. Ritual ibadah haji seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah, thawaf di Ka'bah, dan sa'i membutuhkan kondisi prima dari setiap jemaah.

Apalagi, jauh sebelum adanya pembatasan usia haji oleh Pemerintah Arab, Indonesia sudah menetapkan aturan tersebut. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 13 Tahun 2021, di mana Menteri Agama memberi prioritas kuota kepada

jemaah haji reguler berusia paling rendah 65 tahun dengan persentase tertentu. Selain itu, sejak 2023 pemerintah menetapkan kebijakan haji ramah lansia dengan penekanan pada istitha'ah kesehatan.

Dia lebih menekankan untuk melakukan optimalisasi dan memperketat istitha'ah kesehatan sebagai langkah mitigasi layanan ramah lansia. Di samping itu, dia juga mendesak pemerintah untuk menerapkan kembali kebijakan jemaah lansia dengan pendamping dengan persyaratan tertentu. Sebab faktanya, proporsi jumlah petugas haji utamanya petugas kesehatan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah jemaah. (*)

Tindakan Serakah:

Bila Dibiarkan, Pagar Laut Itu Bisa Menjadi Pagar Beton

Anggota DPD RI asal Banten Habib Ali Alwi mengecam pedas pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang sebagai tindakan yang serakah. Bila dibiarkan, kata dia, pagar laut itu bisa berubah jadi pagar beton.

Adhi Nugroho

Penulis



Senator Habib Ali Alwi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Kritik ini disampaikan dalam Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III tahun 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/1/2025). “Itu kerjaan orang yang serakah, itu saja jawabannya. Kalau orang serakah, mereka akan mulai menguasai fisik dulu. Awalnya, pagarnya bambu, tapi nanti sebentar lagi bisa jadi pagar beton,” ujar Ali.

Ali juga mendesak pemerintah pusat untuk segera bertindak menyelesaikan masalah ini, mengingatkan bahwa konstitusi negara melindungi kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. “Itu pemerintah pusat harus bersikap, walaupun bagaimana ini adalah di Pasal 33 itu air, tanah, semua itu adalah tanggung jawab negara untuk

kemaslahatan masyarakat,” kata Ali.

Sementara itu, Alfiansyah Bustami, anggota DPD RI asal Jawa Barat, menganggap situasi tersebut sebagai peluang kerja sama ekonomi. “Itu harusnya ada kerja sama dengan perusahaan terali. Jadi enak semuanya kerja, yang mager dapat duit, yang dipager juga dapat duit,” ujar Bustami dengan nada kelakar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengambil tindakan terhadap kegiatan pemagaran ini. Pada Kamis (9/1), kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang mencapai 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang telah disegel. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan

karena pemagaran diduga melanggar perizinan.

Berita serupa juga muncul dari perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimana pemagaran laut berbahan bambu yang membentuk garis panjang seperti tanggul juga dilaporkan. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak yang berwenang mengenai masalah di Bekasi.

Ali mengingatkan jika tindakan serakah seperti ini terus dibiarkan, akan ada dampak buruk terhadap lingkungan. “Mau direklamasi atau mau diapakan, kami enggak tahu yang jelas ini adalah keserakahan, tapi nanti kalau sudah terlalu serakah nanti kayak (musibah kebakaran) Los Angeles,” ucap Ali secara tegas. (*)

Ekspor Komoditas Unggulan NTB Harus Dioptimalkan

Betria Eriani

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Evi Apita Maya, menyoroti penurunan ekspor dan potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan. Dalam kunjungan ke Dinas Perdagangan NTB pada Jumat (10/1/2025), bersama Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarty, dan pelaku usaha, Evi menggarisbawahi pentingnya memperbaiki infrastruktur konektivitas untuk mendorong ekspor komoditas unggulan daerah.

Evi menekankan peran strategis Pelabuhan Gili Mas dalam mengatur lalu lintas ekspor yang belum maksimal. “Kita tidak boleh kalah dari Bali dan Surabaya. Bayangkan, setiap tahun ada 54.000 ekor sapi dari Bima dan Dompu yang dikirim ke Jakarta, tapi tanpa fasilitas kapal khusus ternak. Ini jelas tidak mendukung pertumbuhan ekonomi NTB,” ucapnya.

Menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok seperti beras, cabai, dan sayuran menjelang Ramadan, Evi meminta pemerintah daerah meningkatkan



Anggota DPD RI Evi Apita Maya bersama Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarty. (Foto Tim Evi Apita Maya)

“ Kita tidak boleh kalah dari Bali dan Surabaya. Bayangkan, setiap tahun ada 54.000 ekor sapi dari Bima dan Dompu yang dikirim ke Jakarta, tapi tanpa fasilitas kapal khusus ternak. Ini jelas tidak mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. ”

**Anggota DPD RI,
Evi Apita Maya**

koordinasi dengan pelaku usaha untuk mengendalikan inflasi dan melindungi kelompok ekonomi rentan. “Stabilitas harga bahan pokok adalah prioritas uta-

ma. Kita harus melindungi masyarakat dari dampak inflasi,” tambahnya.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarty, menyatakan bahwa absennya fasilitas pengangkutan khusus ternak adalah kendala utama dalam rantai distribusi. “Kami berharap Ibu Evi dapat memperjuangkan pengadaan kapal khusus ternak ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan,” kata Yuniarty.

Untuk mengendalikan inflasi, Yuniarty juga mengungkapkan rencana penguatan stok bahan pokok melalui kerja sama dengan distributor besar, sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga. (*)



Teras Narang Ajak Masyarakat Dukung Ketahanan Pangan

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang saat bersilaturahmi ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng. (Foto PWI Kalteng)

Arso Pranoto Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, menyerukan dukungan masyarakat lokal terhadap program ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah daerah. Dalam kunjungan ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Palangka Raya pada Kamis (9/1/2025), Teras Narang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif demi tercapainya kemandirian dan ketangguhan daerah menghadapi masa depan.

Teras Narang menyatakan bahwa dukungan

masyarakat adalah kunci untuk memajukan Kalimantan Tengah. “Dengan semakin banyak kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, maka daerah akan berkembang dan maju,” ujarnya. Kunjungan ini adalah bagian dari serangkaian pertemuan yang juga mencakup diskusi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalteng.

Menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia, Teras Narang juga menyampaikan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan adalah prioritas utama sesuai visi misi presiden. Ia berharap program-program

ini dapat mempercepat pembangunan di Kalimantan Tengah.

Apresiasi juga diberikan kepada Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, atas kesiapannya dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk swasembada pangan. Teras Narang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 triliun untuk program ini.

“Kalteng dipastikan siap untuk mendukung ketahanan pangan. Karena itu perlu dukungan semua pihak untuk berkolaborasi dalam membangun wilayah,” tutur Teras Narang, menambahkan bahwa TNI dan Polri juga terlibat dalam upaya ini. (*)

Senator Lambek Soroti Kinerja Pansel Calon DPR Papua Barat

Didin Saputra

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari pemilihan Papua Barat Lambek Dowansiba, menyoroti kinerja Panitia Seleksi Calon DPR Papua Barat yang dinilai cenderung tertutup atau tidak transparan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pansel belum juga mengumumkan proses hasil seleksi tahap satu.

“Sebagai Anggota Komite I DPD yang juga membidangi Otonomi Khusus di Papua, saya mempertanyakan proses seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB). Mengapa hingga saat ini belum juga diumumkan,” tanya Lambek Dowansiba, Minggu (5/1/2025).

Menurut Lambek, sesuai jadwal, seharusnya sudah diumumkan akhir Desember 2024 lalu, atau (30/12/2024). Di mana dilakukan uji kompetensi yang diubah dengan musyawarah adat. Dia menilai seleksi kali ini cenderung tidak transparan dan ada indikasi keganjalan.

Dia menyebut data yang diterimanya, terdapat sejumlah calon berasal dari kalangan politisi yang

masih terdaftar sebagai anggota partai politik dan juga aparatur sipil negara (ASN) aktif yang memasukkan berkas ke Pansel. “Sebenarnya mekanisme rekrutmen ini seperti apa, apakah mengakomodir politisi dan juga ASN aktif atau seperti apa,” ujarnya dan Pansel agar dalam prosesnya terbuka menyampaikan ke publik setiap tahapan seleksi yang ada di 7 kabupaten di Papua Barat.

Sementara itu, anggota panitia seleksi DPR-PB Yuliana Numberi mengatakan soal peserta yang mendaftar namun berlatar belakang sebagai politikus maupun ASN, Pansel tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 106 dan 107 terkait Otonomi Khusus Papua.

“Kita tetap mengacu pada PP 106 dan 107 peraturan Pansel bahwa

Calon Anggota DPRD P yang sebelumnya terdaftar sebagai anggota parpol minimal mengundurkan diri dari parpol lima tahun dan bagi ASN harus mengajukan pengunduran diri ke BKN, kemudian juga calon anggota DPRPB serta anggota MRP yang masuk daftar tunggu harus mengajukan pengunduran diri,” kata Yuliana.

Soal tahapan proses saat ini, Yuliana mengatakan dari 7 kabupaten di Papua Barat, baru dua kabupaten yang telah mengirim hasil ke Pansel, yakni Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Kaimana, masing-masing tiga orang untuk mengikuti tahapan lanjutan.

Sedangkan lima kabupaten lain belum mengirim hasil ke Pansel. (*)



Anggota DPD RI Lambek Dowansiba.
(Foto/dok pribadi)

Tingkatkan Pengawasan Virus HMPV, Senator Lia Apresiasi BBKK Surabaya

M. Fathoni

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jawa Timur Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Human Metapneumovirus (HMPV). Dalam kunjungannya ke BBKK Surabaya pada Senin (13/1/2025), Lia memuji responsivitas lembaga tersebut dalam mengawasi potensi masuknya virus baru melalui Bandara Internasional Juanda. “Sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan yang bertugas mencegah penyakit di pintu masuk negara, mereka sangat responsif dalam menghadapi potensi masuknya virus baru ini,” ujar Lia.

Menurut Lia, kekhawatiran masyarakat Indonesia terkait virus yang sedang merebak di China diperparah oleh pengalaman pandemi COVID-19. Namun, ia mengingatkan bahwa Menkes Budi Gunadi Sadikin telah memberikan pernyataan menenangkan bahwa HMPV bukan virus mematikan dan mirip dengan gejala flu biasa. “Virus ini sudah ada sejak tahun 2001 dan dapat dikategorikan mirip dengan



Anggota DPD RI Lia Istifhama dalam kunjungannya ke Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya. (Foto/dok pribadi)

gejala flu biasa,” kata Lia.

Kepala BBKK Surabaya Rosidi Roslan, menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaku perjalanan luar negeri yang tiba melalui Bandara Juanda telah diperketat, khususnya untuk HMPV. “Kami telah meningkatkan intensitas pengawasan sesuai arahan dari pusat. Petugas kami dilengkapi dengan informasi terbaru dan pelatihan cara melakukan screening kesehatan,” jelas Rosidi.

Rosidi menambahkan bahwa meskipun pengawasan ditingkatkan, belum ada data yang menunjukkan deteksi virus HMPV di Bandara Juanda. BBKK Surabaya terus berkoordinasi dengan instansi dan sektor terkait untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan penyakit menular ini. “Hingga saat

ini, belum ada deteksi virus HMPV yang masuk melalui Bandara Juanda,” kata Rosidi.

Selain pengawasan, BBKK Surabaya juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi Satu Sehat Health Pass (SSHP) untuk memantau status kesehatan pelaku perjalanan luar negeri. Aplikasi ini berfungsi mengintegrasikan data kesehatan kedatangan pelaku perjalanan luar negeri yang pengisiannya dilakukan di pintu masuk bandara.

Ning Lia berharap langkah-langkah yang diambil BBKK Surabaya dapat diterapkan secara konsisten di semua pintu masuk negara untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. “Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadapi ancaman kesehatan global,” tutup Ning Lia. (*)

Sultan Dukung Indonesia Menjadi Anggota BRICS

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Indonesia secara resmi telah menjadi anggota BRICS, sebuah organisasi antar-pemerintah yang merupakan forum kerja sama antara negara-negara berkembang. BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, bertujuan untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang di panggung internasional dan sering membahas isu-isu strategis global. Keberadaan Indonesia sebagai anggota baru ini diumumkan pada Selasa, 7 Januari 2025.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, keberhasilan Indonesia masuk ke dalam BRICS tidak lepas dari peran serta kinerja diplomatik Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Sultan mengemukakan bahwa keanggotaan ini merupakan kabar positif bagi hubungan internasional dan khususnya akan membawa pengaruh besar terhadap kinerja perdagangan Indonesia.

Presiden Prabowo dan tim Kementerian Luar Negeri telah bekerja keras, melakukan serangkaian kunjungan kenegaraan ke berbagai negara dalam dua bulan pertama pemerintahannya. Usaha maraton ini bertujuan untuk



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

memperkuat posisi Indonesia dan meyakinkan para pemimpin global tentang kapasitas dan komitmen Indonesia dalam kerja sama internasional.

Peningkatan status Indonesia dalam BRICS juga menandai suatu momentum penting dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tengah eskalasi ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi berbagai kawasan, termasuk Indonesia. Sultan menekankan bahwa Indonesia kini memiliki modal diplomatik yang lebih kuat untuk tampil percaya diri dan berpengaruh di arena global.

Dari sisi Brasil, yang merupakan presiden bergilir BRICS pada tahun 2025, pemerintah Brasil telah mengonfirmasi bahwa keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah disetujui dalam pertemu-

an puncak yang berlangsung di Johannesburg pada tahun 2023. Menurut Kementerian Luar Negeri Brasil, Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap reformasi lembaga pemerintahan global dan memperkuat kerja sama antar negara-negara di belahan selatan.

Sultan mengakhiri dengan menyatakan optimisme bahwa keberhasilan ini akan membuka lebih banyak peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi dan mendapat pengakuan di tingkat internasional. "Dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi diplomasi yang efektif, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan keanggotaannya di BRICS untuk memajukan kepentingan nasional dan regional dalam konteks global yang lebih luas," kata Sultan. (*)

DPD RI Minta Batalkan Alih Fungsi 20 Juta Ha Hutan: Reputasi Indonesia Bisa Rusak!



Ilustrasi hutan gundul di NTB (Foto Antara)

Nanda Russia Rola

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, telah menyuarakan keprihatinannya terhadap rencana pemerintah yang ingin mengalihfungsikan 20 juta hektare hutan untuk mencapai tujuan swasembada pangan dan energi. Sultan meminta agar rencana ekstensifikasi pertanian ini dibatalkan, menekankan bahwa Indonesia mengalami penurunan luas lahan pertanian, namun hal itu seharusnya diatasi dengan mengembangkan sistem pertanian intensif yang mendukung agroforestri dan pemanfaatan teknologi modern, bukan dengan deforestasi.

Sultan menyatakan dukungannya terhadap

upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional, namun menegaskan bahwa mengorbankan hutan cadangan hanya akan merusak keseimbangan ekosistem dan iklim. Deforestasi, menurut Sultan, akan menimbulkan masalah sosial dan mengancam ketahanan iklim, yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Rencana tersebut juga berpotensi menurunkan reputasi Indonesia dalam aksi penurunan emisi karbon dan negosiasi pendanaan iklim global.

Sultan menyarankan bahwa pemerintah sebaiknya mempertimbangkan opsi yang lebih ramah lingkungan untuk memastikan kesediaan pangan dan sumber energi baru terbarukan. Dia mengkritik rencana alih fungsi lahan hutan sebagai

langkah yang gegabah dan berbahaya.

Dalam mengakhiri pernyataannya, Sultan menyerukan kepada pemerintah untuk merevisi rencana tersebut dan memprioritaskan pendekatan intensifikasi pertanian serta penerapan agroforestri yang lebih berkelanjutan pada hutan cadangan yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

Pemerintah, melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, telah mengungkapkan bahwa pengidentifikasian 20 juta hektar lahan hutan cadangan ini adalah bagian dari konsep baru yang akan mendukung program-program yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (*)

Alih Fungsi Hutan Memarjinalkan Kaum Adat



Ilustrasi hutan gundul di NTB (Foto ist)

Helena Agustina FO

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Al Hidayat Samsu, menyuarakan penentangannya terhadap rencana Menteri Kehutanan yang ingin mengubah 20 juta hektare hutan menjadi lahan pertanian dan energi. Pada Selasa (7/1/2025), dia mengkritik bahwa kebijakan tersebut akan merusak ekosistem yang sudah berada dalam kondisi kritis dan mempengaruhi masyarakat adat di Indonesia.

Menurut Samsu, rencana tersebut akan mempercepat deforestasi yang sudah menjadi masalah serius di negara ini. Data dari Forest Watch Indonesia (2021)

mengungkapkan bahwa luas hutan alami di Indonesia menurun dari 106 juta hektare pada tahun 2000 menjadi hanya 82 juta hektare pada tahun 2017. “Kebijakan ini dikhawatirkan akan menghilangkan lebih banyak lagi area hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat,” tegas Syamsu.

Samsu juga menyoroti dampak deforestasi terhadap bencana alam. Sejak tahun 2000, Indonesia telah mengalami 14.545 kejadian banjir yang berdampak pada 33,3 juta orang, menyebabkan kematian lebih dari 23 ribu jiwa dan menghilangkan ribuan lainnya. Kekeringan juga tidak kalah serius, memengaruhi 17,3 juta orang termasuk petani

yang kehilangan sumber penghidupan mereka.

Deforestasi, sebut Samsu, telah terjadi bahkan di wilayah yang seharusnya dilindungi seperti taman nasional dan cagar alam. Tercatat selama tahun 2023, sebanyak 31 taman nasional, 45 cagar alam, dan 26 suaka satwa telah mengalami kerusakan akibat aktivitas penebangan hutan.

Mengingat kondisi tersebut, Samsu mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan wacana alih fungsi hutan ini dan mengkaji ulang kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dia menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk melindungi hutan di Indonesia, memprioritaskan suara masyarakat adat dan lokal, serta menghindari kebijakan pembangunan yang dapat merusak lingkungan. (*)



Anggota DPD RI Al Hidayat Samsu.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Senator Stefanus: Peran Wartawan Sangat Strategis

Anggota DPD RI
Stefanus BAN Liow.
(Foto Biro PHM Setjen
DPD RI)

Betria Eriani

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow mengatakan bahwa peran wartawan dalam negara demokrasi sangatlah penting dan strategis. Peran wartawan adalah berpikir, berkata dan bertindak sebagai pengawas kekuasaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Saat berdiskusi dengan komunitas wartawan di Minahasa Selatan, Jumat (10/1). Stefanus yang pernah menjadi wartawan surat kabar Suara Minahasa itu menjelaskan peran kunci wartawan, diantaranya sebagai pengawas kekuasaan, sumber informasi, pengawal

kebebasan pers, pengembang opini publik, penghubung suara rakyat dan penguasa.

Namun, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI itu menyayangkan ada oknum wartawan yang tidak bisa menjaga netralitas dan independensinya. Seperti ada yang terlibat sebagai tim sukses calon kepala daerah tertentu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Tidak dapat dipungkiri bahwa sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, segelintir oknum wartawan seakan tersandera dalam suksesi demokrasi menjadi tim sukses dalam pilkada,

baik secara terang-terangan maupun *silent*,” kata Stefa, begitu dia akrab disapa.

Karena itu, Stefa mengingatkan komunitas wartawan untuk senantiasa menjaga profesionalisme, etika, jati diri, integritas dan citranya dengan tetap mewartakan atau menyajikan informasi yang akurat, tidak berpihak, dan berimbang, serta menghormati privasi dan hak-hak individu.

Senator Stefa juga mengungkapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang selama ini mewartakan tugas, wewenang dan kiprah kelembagaan DPD RI serta hasil-hasil kerja politiknya kepada publik sebagai pertanggungjawaban moral dan politik. (*)



Sawit Bisa Jadi Modal *Soft Power* Indonesia

Perkebunan sawit. (Foto Info Sawit)

Lela Sadiyah

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan, Indonesia beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Dengan potensi yang dimiliki, produk perkebunan kelapa sawit Indonesia berpeluang menjadi *soft power* Indonesia dalam peta geopolitik global.

“Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik Presiden Prabowo selama dua bulan pertamanya. Sawit bisa menaikkan posisi tawar Indonesia, di samping karena kapasitas kepemimpinan dan ke-

mampuan diplomasi presiden Prabowo,” kata Sultan, Rabu (8/1/2025).

Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung program swasembada pangan dan energi yang dicanangkan pemerintah. Karena dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara.

“Pemerintah perlu didukung secara sosial dan politik dalam membangun ketahanan pangan dan energi nasional. Khususnya pada sektor pangan dan energi yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Sultan mengatakan, program pengembangan kelapa sawit sangat relevan

dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Saat ini, semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.

“Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi *market leader* dan *price maker* produk olahan kelapa sawit di dunia,” kata mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.

Pasar minyak sawit atau *crude palm oil (CPO)* global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas. (*)

Korban TPPO di Kamboja, Keluarga Laporkan ke Senator



Anggota DPD RI Sudirman ketika menerima pengaduan keluarga korban TPPO, Mirza Saputra. (Foto Istimewewa)

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Warga Aceh kembali menjadi korban dari praktik penipuan kerja atau Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) di Kamboja. Kali ini yang menjadi korban adalah Mirza Saputra (26), warga Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Pihak keluarga korban mengadu hal tersebut kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh Sudirman atau Haji Uma. Menerima pengaduan tersebut, Haji Uma menyayangkan berulangnya kasus TPPO yang menimpa warga Aceh. Kasus ini telah berulang kali terjadi, dan semestinya dapat menjadi pelajaran dan kewas-

padaan di tengah masyarakat.

“Sangat kita sayangkan. Karena kasus ini telah terjadi berulang kali dan berulang kali juga kita ingatkan. Mestinya hal ini jadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih waspada,” ujar senator yang dikenal kerap memberikan bantuan perlindungan dan pemulangan warga Aceh korban TPPO, Selasa (7/1/2025).

Berdasarkan laporan pihak keluarga yang diterima Haji Uma melalui Surat Keuchik Gampo Banda Masen Kecamatan Banda Sakti, Mirza Saputra berangkat ke Kamboja melalui agen yang dikenal dari temannya yang diiming-imingi dengan gaji besar. Mirza berangkat dari Aceh tanggal 31 Desember 2024 dan masuk di Kamboja tanggal 2 Januari 2025. Pada

tanggal 5 Januari 2025, pihak keluarga menerima sambungan telepon dari Kamboja yang meminta uang tebusan sebesar Rp50 juta. Apabila dalam waktu tertentu tidak diserahkan, nyawa korban menjadi taruhan.

“

Sangat kita sayangkan. Karena kasus ini telah terjadi berulang kali dan berulang kali juga kita ingatkan. Mestinya hal ini jadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih waspada.

”

**Anggota DPD RI,
Sudirman**

Menindaklanjuti pengaduan keluarga korban tersebut, Haji Uma mengaku telah menyurati Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI untuk melakukan upaya proteksi dan advokasi terhadap korban di Kamboja. Haji Uma berharap korban dapat segera ditemukan untuk dipulangkan.

Haji Uma juga kembali mengingatkan warga Aceh bahwa di Aceh saat ini banyak agen dari warga Aceh sendiri yang mencari korban dengan mengajak serta menjanjikan kerja di luar negeri dengan gaji besar, terutama tujuan negara Kamboja, Myanmar dan Laos. (*)



Komite III DPD RI Soroti Dosen ASN Tak Terima Tukin

Karangan bunga dari dosen ASN di Kemdiktisaintek yang menuntut tunjangan kinerja. (Foto Media Indonesia)

Rini Sumarni

Penulis

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Filep Wamafma, angkat bicara terhadap problematika yang dihadapi kalangan dosen yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). Mereka tidak menerima tunjangan kinerja (tukin), seperti ASN yang bekerja di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah.

Kementerian Keuangan tidak mengakui tunjangan kinerja untuk dosen karena menyangkut perubahan nomenklatur. Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengharuskan dosen bekerja di kantor dari pukul 8.00 WIB hingga 16.00 WIB.

“Kondisi ini menyebab-

kan banyak dosen ASN bergantung pada honor tambahan dari tugas dinas, seperti seminar atau *workshop*. Sedangkan, keterlambatan pembayaran tukin juga berdampak pada kesejahteraan dosen dan berisiko menurunkan kualitas ekosistem pendidikan tinggi,” kata Filep, Selasa (7/1/2025).

Solusi mengatasi masalah ini adalah dengan penerbitan peraturan presiden (perpres). Penerbitan perpres harus mencakup mekanisme pemberian tukin yang sesuai dengan karakteristik profesi dosen. Selain itu, perlu diharmonisasi regulasi antara Kemdiktisaintek dengan Kementerian Keuangan agar anggaran dapat dialokasikan secara efektif. Selain itu juga merevisi Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Revisi ini dapat memuat ketentuan yang lebih jelas soal hak dosen ASN

atas tukin, diiringi dengan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi yang otonom dan akuntabel.

“Penyusunan skema pembayaran tunjangan kinerja dapat dimulai dengan pemberian secara bertahap berdasarkan prioritas tertentu. Misalnya, berdasarkan jabatan fungsional atau beban kerja. Langkah ini dapat mengurangi beban keuangan negara sekaligus memberikan manfaat langsung kepada dosen ASN yang membutuhkan,” sebutnya.

Masalah tukin dosen ASN mencuat setelah Aliansi Dosen ASN Kemendikisaintek (Adaksi) merasa kecewa karena mereka tidak diberlakukan setara dengan pegawai ASN lainnya yang menerima tukin setiap bulan. Mereka juga menuntut perlakuan sama dengan ASN lainnya. (*)

SULTAN DUKUNG PELAKSANAAN RETREAT BAGI KEPALA DAERAH



Anggota Kabinet Merah Putih yang saat mengikuti *reatreat* di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah Oktober 2024 lalu. (Foto Istimewa)

Rini Sumarni

Penulis

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melaksanakan pelatihan atau *retreat* untuk kepala daerah se-Indonesia. *Retreat* itu tidak hanya akan menyatukan misi antara presiden dengan kepala daerah, tapi juga meningkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme para kepala daerah dalam mengawal program strategis pemerintah pusat di daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang ingin memastikan para kepala daerah memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat. *Retreat* memiliki dampak yang positif dan berarti dalam menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air,” kata Sultan, Selasa (14/1/2025).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta semua kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, untuk berpartisipasi dalam kegiatan *retreat* tersebut. Agenda nasionalisme tidak boleh terhalangi oleh warna dan motif politik. Dia optimistis para kepala daerah akan antusias berpartisipasi dalam *retreat* nasional nanti. Sekaligus menjadi ajang silaturahmi nasional kepala daerah.

Meski demikian, Sultan berharap agar *retreat* kepala daerah tidak diartikan sebagai upaya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat di tengah wacana pelaksanaan pilkada melalui DPRD. “Kami ingin *retreat* menjadi tradisi kebangsaan yang rutin diselenggarakan bagi setiap warga negara yang diamanahkan sebagai pejabat negara dan kepala daerah,” tutupnya.

Wacana tersebut juga

disambut baik oleh kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024. Seperti dilonarkan Khofifah Indar Parawansa yang terpilih kembali menjadi Gubernur Jawa Timur. Dia menyambut baik rencana tersebut. “Menurut saya, *retreat* menjadi bagian penting untuk saling meng-*update* bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi,” kata Khofifah di Istana Kepresidenan, Selasa (17/1/2025).

Sebelumnya Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pelatihan atau *retreat* untuk seluruh kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024. Konsepnya akan mirip seperti *retreat* kabinet Merah Putih yang saat itu dikumpulkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah pada Oktober 2024 lalu. (*)

Fahira Dukung MCU Gratis

Sadiyah

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Fahira Idris, mengapresiasi peluncuran program *medical check-up* (MCU) gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Fahira menilai bahwa pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting karena efektif untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Program MCU gratis ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan biaya dan akses layanan kesehatan yang selama ini menjadi kendala utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Menurut Fahira, dengan mengatasi hambatan biaya dan akses, program tersebut berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta mempercepat tercapainya tujuan kesehatan nasional yang lebih baik. Ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.



Ilustrasi Medical Check Up. (Foto Aulia Hospital)

“Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan rutin masih rendah di kalangan masyarakat. Banyak orang baru memeriksakan diri ketika gejala penyakit sudah parah, sehingga mengurangi peluang pengobatan yang efektif.”

Anggota DPD RI,
Fahira Idris

“Kesadaran untuk melakukan pemeriksaan rutin masih rendah di kalangan masyarakat. Banyak orang baru memeriksakan diri ketika gejala penyakit sudah parah, sehingga mengurangi peluang pengobatan yang efektif,” ujar Fahira pada Senin (6/1/2025).

Fahira yakin bahwa program MCU gratis akan memberikan dampak positif

yang besar terhadap peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia. Selain mendeteksi penyakit pada tahap awal, pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan peluang penyembuhan dan mencegah komplikasi yang lebih serius.

Program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas dengan mengurangi risiko kematian akibat penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Selain itu, pemeriksaan kesehatan tanpa biaya ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya dan membangun budaya pemeriksaan rutin sebagai langkah preventif.

“Dampak besar yang paling diharapkan dari program ini adalah berkurangnya kasus penyakit kronis yang membutuhkan penanganan jangka panjang. Hal ini akan berkontribusi pada pengurangan beban anggaran kesehatan negara,” tambahnya. (*)

Harapan Senator Henock ke Gubernur Kaltim Terpilih



Anggota DPD RI
Yulianus Henock Sumual
bersama Penjabat
Gubernur Kaltim Akmal
Malik. (Foto JPNN)

M Fathoni

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Yulianus Henock Sumual, menghadiri acara puncak Peringatan HUT ke-68 Kaltim dengan tema 'Membangun Kaltim untuk Nusantara', di Stadion Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Kamis (9/1/2025). Sebelumnya, dia juga menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kaltim dengan agenda yang sama.

"Selaku anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kaltim, kami siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan seluruh rakyat Kaltim untuk terus membangun daerah yang kita cintai ini," kata

Yulianus Henock saat menyampaikan sambutan pada acara HUT ke-68 Kaltim itu.

Mewakili anggota DPD RI lainnya, Yulianus Henock juga menyampaikan rasa bangga atas perkembangan demokrasi di Provinsi Kaltim yang semakin luar biasa. Pelaksanaan berbagai kontes-tasi, dari pemilihan presiden, pemilu legislatif, dan pilkada berlangsung dengan baik. Karena itu, dia mengajak masyarakat Kaltim untuk terus menjaga kedamaian.

Pada kesempatan tersebut, Yulianus Henock juga menyampaikan pesan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur terpilih, Rudy Mas'ud dan Seno Aji, yang juga hadir di tempat acara. Ada lima poin harapan yang disampaikannya untuk kemajuan Kalimantan Timur

ke depan.

Pertama, terus membangun infrastruktur berkelanjutan. Kedua, bangun sumber daya manusia berkualitas. Ketiga, tingkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Keempat, wujudkan ketahanan pangan dan pengelolaan energi sumber daya alam yang ramah lingkungan. Kelima, jaga situasi Kaltim yang kondusif sebagai Ibu Kota Negara (IKN).

Yulianus Henock menekankan bahwa senator dan legislator dari daerah pemilihan Kaltim siap berjuang menyuarakan aspirasi dan kepentingan provinsi berpenduduk lebih dari 4 juta jiwa itu untuk menuju pembangunan yang berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (*)

Pariwisata Ramah Disabilitas Menjadi Perhatian DPD RI

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Sektor pariwisata Indonesia tampaknya kembali menggeliat mulai tahun 2023 setelah mengalami penurunan tajam selama pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023, devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai US\$14 miliar. Pada tahun 2024, pemerintah mengestimasi potensi nilai devisa mencapai Rp25,4 triliun dari berbagai kegiatan pemasaran yang telah dilakukan sepanjang tahun.

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Erni Daryanti, menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap Kementerian Pariwisata atas berbagai inovasi yang telah dilakukan. “Tentu saja, Komite III DPD RI sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Pariwisata yang telah melakukan berbagai inovasi dalam upaya menghidupkan kembali pariwisata Indonesia,” ucap Erni Daryanti pada Sabtu (11/1/2025).

Namun, Erni menilai bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Kementerian Pariwisata. Salah satu masalah utama adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang diperkirakan



Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

akan berdampak pada daya beli masyarakat, termasuk di sektor pariwisata. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah implementasi konsep pariwisata ramah disabilitas.

Konsep pariwisata ramah disabilitas mulai diperkenalkan sejak tahun 2021, melalui terbitnya Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021. Namun, tiga tahun berlalu, jumlah destinasi yang ramah disabilitas masih terbatas. “Masih banyak pengelola destinasi yang belum memahami atau bahkan mengabaikan pelaksanaan konsep tersebut,” kata Erni.

Erni juga menegaskan perlunya penguatan terhadap konsep pariwisata ramah disabilitas. “Karena itu, Komite III DPD RI memandang perlu adanya penguatan terhadap konsep pariwisata ramah disabilitas sebagai perintah undang-undang. Apabila tidak dilaksanakan,

harus dibebani sanksi hukum. Sehingga ada daya paksa bagi stakeholder pariwisata untuk melaksanakannya,” imbuhnya. Komite III DPD RI telah mencantumkan norma konsep pariwisata ramah disabilitas dalam Perubahan UU Pariwisata yang disusun tahun 2024.

Pada tingkat global, konsep pariwisata ramah disabilitas telah menjadi bagian dari pariwisata berkelanjutan yang dikenal sejak tahun 2019. United Nations Tourism Organization (UNWTO) dan The ONCE Foundation meluncurkan The Accessible Tourism Destination (ATD) sebagai penghargaan tahunan yang mengakui destinasi wisata yang menyediakan layanan inklusif bagi semua wisatawan, terlepas dari keterbatasan mereka. Portugal, Barcelona, dan kota Thrissur di India adalah tiga destinasi wisata yang memperoleh penghargaan ATD pertama kali pada tahun 2020. (*)

Pemkab Kulonprogo Diminta Memetakan Potensi Wisata



Anggota DPD RI Ahmad Syauqi Suratno saat menjadi pembicara Sarasehan Penggiat Pariwisata Kulonprogo. (Foto KR)

Arso P Nugroho

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Syauqi Suratno meminta Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memetakan potensi wisata di daerah tersebut dan segera membangunnya agar mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dalam meningkatkan perputaran uang di wilayah kabupaten itu.

Ahmad Syauqi juga menyarankan masyarakat dan pelaku wisata menjadikan pariwisata sebagai jiwa dalam mencapai tujuan pembangunan. “Semua pemangku kepentingan hendaknya segera konsolidasi-

“**Semua pemangku kepentingan hendaknya segera konsolidasikan potensi wisata di Kulonprogo.**”

**Anggota DPD RI,
Ahmad Syauqi
Suratno**

dasikan potensi wisata di Kulonprogo,” kata Ahmad Syauqi Suratno saat menjadi pembicara Sarasehan Penggiat Pariwisata Kulonprogo di Terras Kota, Wates, Kulonprogo, Selasa (17/12/2024).

Pihaknya juga minta Pemkab Kulonprogo mengenali potensi-potensi

destinasi wisata yang akan menjadi fokus pengembangan, baik destinasi alam maupun destinasi pengembangan. Syauqi melihat di Kulonprogo ada *ecotourism* yang bisa dikembangkan dan beberapa *tourism* lain juga bisa dikembangkan,” jelasnya.

Dia mengingatkan Pemkab Kulonprogo membenahi infrastruktur, mulai fisik hingga nonfisik. Infrastruktur fisik dengan pengoptimalan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Sedangkan infrastruktur nonfisik seperti teknologi informasi harus diperbaharui, promosi dan produksi destinasi. “Prinsipnya semua harus diperbaharui,” tegasnya.

Ketua Badan Promosi Wisata Kulonprogo Ridho Sinto Mardaris berharap sarasehan penggiat pariwisata Kulonprogo bisa mempererat komunikasi penggiat pariwisata dan dunia usaha. Sehingga pariwisata Kulonprogo ke depan semakin maju dan perekonomian di kawasan destinasi wisata berkembang pesat.

Ridho menilai komunikasi penggiat pariwisata selama ini sangat minim dan bekerja secara individu. “Kami dari Badan Promosi Wisata Kulonprogo berupaya menjembatani pengusaha perhotelan, penyedia jasa transportasi dan pengelola destinasi wisata untuk menjalin komunikasi,” pungkasnya. (*)

Perlu Pengawasan Ketat Bus Pariwisata



Anggota DPD RI Lia Istifhama bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono. (Foto Jawa Pos)

Nanda Russia Rola

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Lia Istifhama meminta seluruh instansi terkait, dinas perhubungan, dinas pendidikan (Dispendik), serta dinas pariwisata di seluruh daerah untuk lebih proaktif dalam mengawasi kondisi armada bus pariwisata yang mengangkut wisatawan maupun pelajar yang melakukan wisata.

“Penting pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional bus pariwisata. Jangan hanya gara-gara bus mengalami rem blong menimbulkan dampak yang sangat fatal bagi penumpang,” kata Ning Lia, sapaan akrabnya, saat

melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, pada Jumat (10/1/2025).

Dalam kunjungannya itu, Ning Lia membicarakan kecelakaan tragis yang terjadi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada Rabu (8/1/2025), menyebabkan empat orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini melibatkan sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar mengalami rem blong. Kecelakaan tersebut meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak, termasuk bagi dirinya sendiri.

Pada kesempatan tersebut, Ning Lia mengapresiasi langkah positif yang

telah dilakukan oleh Dishub Provinsi Jawa Timur, yang pada pertengahan tahun 2024 lalu telah mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendorong melakukan *ramp check* atau pemeriksaan kendaraan, untuk memastikan kondisi teknis kendaraan, khususnya rem, dalam keadaan baik sebelum beroperasi.

“Saya mengapresiasi inisiatif dari Dishub Jatim yang telah mengeluarkan surat imbauan untuk melakukan *ramp check* pada bus pariwisata. Ini adalah langkah proaktif yang sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Saya berharap agar instansi terkait, seperti Kemenag, Dispendik, dan Dinas Pariwisata, bisa mendorong sekolah atau lembaga lainnya untuk memeriksa bus yang akan digunakan, demi keselamatan penumpang,” kata Ning Lia.

Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur Nyono mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap bus pariwisata memang menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, bus pariwisata yang tidak terjadwal (*non-trayek*) sering kali tidak berangkat dari terminal resmi, sehingga sulit untuk dipantau oleh petugas. Oleh karena itu, Dishub Jatim mendorong pengelola bus pariwisata untuk melakukan pemeriksaan kendaraan di tingkat kabupaten/kota setempat. (*)



DPD RI Kawal Empat RUU Prolegnas Prioritas Jadi UU



Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 DPD RI, di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Arso P Nugroho

Penulis

Empat rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Karena itu, DPD RI berkomitmen dan bekerja lebih optimal dalam memperjuangkan agar keempat UU tersebut disahkan menjadi undang-undang (UU).

Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda), RUU tentang Perubahan Iklim, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Daerah Kepulauan. Khusus RUU Daerah Kepulauan sudah diperjuangkan DPD RI sejak lama, hanya saja belum terwujud menjadi UU.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan, memperjuangkan keempat

RUU tersebut menjadi UU merupakan bagian dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. “Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita,” kata Sultan saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/25).

Dia menyebut DPD RI harus bersinergi dan berkolaborasi, serta bekerja lebih cepat secara efektif dan efisien dalam menindaklanjuti penyusunan empat RUU tersebut. “Kita berharap pada periode ini ada *output* dari RUU inisiatif DPD RI yang berhasil menjadi undang-undang,” ujarnya.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada November 2024 lalu, menyetujui 176 rancangan undang-undang (RUU) masuk Prolegnas Tahun 2025-2029 dan 41 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025. Empat dari RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2025 itu adalah awalnya usulan dari DPD RI. (*)

Daftar Empat RUU usulan DPD RI yang masuk Prolegnas Priotitas 2025

No	Nama Rancangan Undang-Undang	Keterangan
1	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda)	Bareng DPR
2	RUU tentang Perubahan Iklim	Bareng Pemerintah
3	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	Bareng Perorangan
4	RUU tentang Daerah Kepulauan	Perjuangan cukup lama

Haji Uma Sampaikan Aspirasi Daerah dalam Sidang Paripurna DPD RI

M. Fathoni

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Provinsi Aceh Sudirman atau Haji Uma, melaporkan beberapa aspirasi daerah pemilihannya dalam Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun 2024-2025, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Pertama, terkait rencana Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. RUU tersebut disambut baik oleh daerah. Mengingat daerah kepulauan tidak pernah tersentuh pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “RUU Daerah Kepulauan dapat menjadi harapan bagi kemajuan dan pembangunan ke depan, khususnya daerah kepulauan,” kata Haji Uma.

Kedua, menyangkut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang membawa polemik di daerah. Dia menyangkan seperti di bola-bolai. Mereka yang sudah melewati masa umurnya tapi belum juga mendapatkan kepastian penerimaan PPPK. Sesuai UU nomor 20



Anggota DPD RI Sudirman atau Haji Uma dalam Sidang Paripurna DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu pertimbangan bagi pusat.

Ketiga, terkait pengembangan penyeberangan ke Pulau Seumeulu, Aceh. Penyeberangan ini dinilai dapat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Disamping itu juga sangat potensial untuk wilayah wisata. Maka sangat dibutuhkan pembukaan pelabuhan dan penambahan armada kapal cepat.

Hal lain yang dilaporkan Haji Uma, yaitu maraknya terjadi eksploitasi terhadap anak di Aceh dan juga provinsi lain. Anak yang masih di bawah umur dipergunakan dan dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja. Kemudian perdagangan manusia semakin meningkat. Setiap hari

ribuan dipekerjakan di Kamboja sebagai pengendali judi *online*. Ini menjadi catatan penting dan perlu dicari solusinya agar tidak terus menelan korban.

Terakhir, dia melaporkan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena di Aceh merupakan produksi gas juga tetapi hasil dan pembayarannya dilakukan ke pusat. Sementara daerah tidak tahu berapa hasil yang diterima oleh Aceh. Dalam sistem bagi hasil ini diperlukan penjelasan supaya DBH itu jelas berapa penghasilan untuk Aceh. “Kami harapkan dukungan bahkan solusi pemerintah pusat agar mencari solusi setiap aspirasi masyarakat di daerah,” katanya. (*)

Senator Desak Pemerintah Cabut Moratorium Pemekaran

There Oktavina

Penulis

Pada Sidang Paripurna ke-10 Masa Sidang III Tahun 2024-2025, yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (14/1/2025), anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Lampung Ahmad Bastian, mendesak pemerintah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Bastian menyatakan bahwa banyak pembentukan DOB telah mendapatkan persetujuan dari daerah induk yang dimekarkan. Salah satu contoh adalah calon DOB Kabupaten Bandar Negara di Lampung, yang telah disetujui oleh Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah induk.

“Berdasarkan hasil reses Komite I DPD RI, terdapat satu calon daerah otonomi baru di Provinsi Lampung yang telah disetujui untuk dilepaskan oleh kabupaten induknya, yaitu DOB Bandar Negara,” ucap Bastian.

Lebih lanjut, Bastian menekankan peran penting DPD RI dalam menyuarakan kebutuhan untuk mencabut moratorium pemekaran



Anggota DPD RI Ahmad Bastian. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

daerah kepada pemerintah. Menurutnya, pembentukan DOB ini bukan hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga merupakan upaya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami meminta agar DPD RI memiliki pandangan yang sama untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran atau pembentukan DOB ini. Langkah ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi setiap provinsi, termasuk Lampung,” tegasnya.

Bastian juga menyampaikan bahwa masyarakat di Kabupaten Lampung Sela-

tan sangat berharap realisasi DOB Bandar Negara dapat segera terwujud. Daerah Otonomi Baru Bandar Negara ini dianggap sebagai harapan besar bagi masyarakat setempat. Ia optimis bahwa pemekaran ini akan membawa perubahan signifikan dalam pembangunan daerah.

Sebelumnya, persetujuan resmi terhadap nama Kabupaten Bandar Negara sebagai calon DOB telah diberikan oleh DPRD Lampung Selatan pada Rabu (8/1/2025) dalam sebuah rapat paripurna. Pemekaran ini melibatkan lima kecamatan, yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang, dan Merbau Mataram. (*)

DOB langkah Strategis Mewujudkan Keadilan

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Desakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) terus bergulir di daerah. Di Provinsi Jawa Barat saja misalnya, ada sembilan DOB yang diusulkan. Desakan itu mereka sampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jawa Barat Aanya Rina Casmayanti.

“Kedatangan para wakil rakyat dari kabupaten kota di Jawa Barat ini bukan yang pertama karena sebelumnya beberapa delegasi lainnya juga menyampaikan aspirasi serupa,” kata Aanya ketika menerima Pimpinan DPRD Cianjur, yaitu Susilawati dari Fraksi PDIP dan Lepi Ali Firmansyah dari Fraksi PKB, Jumat (10/1/2025).

Aanya mengatakan, pembentukan sembilan DOB di Jawa Barat itu sangat mendasak dan harus segera direalisasikan karena peningkatan anggaran. DOB akan membuka peluang kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, yang sangat penting untuk percepatan pembangunan di wilayah Jawa Barat.

Menurut Aanya, pembentukan DOB akan memungkinkan pemerataan pemba-



Anggota DPD RI Aanya Rina Casmayanti ketika menerima Pimpinan DPRD Cianjur. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

ngunan yang lebih adil dan efisien, khususnya di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. Dengan adanya DOB juga akan memperbaiki akses dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, dan

Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat terwujud.

Aanya membandingkan Jawa Barat dengan Jawa Timur. Jawa Barat dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa hanya memiliki 27 daerah otonom (kabupaten dan kota). Sedangkan Jawa Timur yang memiliki 38 daerah dengan populasi 41 juta jiwa. Ketimpangan ini berdampak pada alokasi dana transfer daerah yang tidak proporsional. “Jawa Barat menerima Rp10,6 triliun lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur, meskipun jumlah penduduknya

lebih besar. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera diatasi,” katanya.

Sebagai perwakilan masyarakat Jawa Barat di DPD RI, dia berkomitmen penuh untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini. Dia percaya bahwa pembentukan DOB adalah langkah strategis untuk mewujudkan keadilan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

“Pada tanggal 10 Desember 2024 lalu, dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI di Senayan, saya secara langsung telah menyampaikan usulan pembentukan sembilan DOB dari DPRD dan Pemprov Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya,” jelasnya. (*)

Banyak Aspirasi Regulasi Desa, BULD Panggil Kementerian Terkait



Pimpinan BULD DPD RI dalam Rapat Pleno BULD yang membahas hasil pemantauan di daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Betria Eriani

Penulis

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah merangkum hasil pemantauan peraturan daerah (perda) dan rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait tata kelola pemerintahan desa. Dari hasil pemantauan tersebut, banyak aspirasi yang harus segera disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Banyak aspirasi masyarakat dan daerah yang harus kami tindaklanjuti ke pemerintah pusat, seperti kesiapan daerah dalam pemilihan kepala desa dalam mengatur perangkatnya. Namun sampai saat ini belum ada regulasi turunannya, sebagai

turunan UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa,” Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow, dalam Rapat Pleno BULD, Rabu (15/1/25).

Fakta di lapangan, penyusunan perda sering terhambat oleh ketiadaan peraturan pemerintah sebagai payung hukum. Kondisi ini memicu permasalahan, termasuk konflik dalam pengisian jabatan perangkat desa, yang berpotensi terus terjadi.

“Oleh karena itu, BULD DPD RI perlu mendorong pemerintah pusat segera menerbitkan peraturan pelaksana, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam menyusun perda yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing,” tambahnya.

Sesuai tugas dan ke-

wenangan yang dimiliki BULD DPD RI terkait legislasi daerah, pihaknya akan mengundang instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian PPN/Bappenas dalam satu rapat dengar pendapat (RDP).

Stefanus memaparkan bahwa aspirasi masyarakat dan desa yang diserap anggota BULD DPD RI di setiap provinsi telah diunggah ke aplikasi Asmasda dan aplikasi yang dikelola oleh BULD, langsung dianalisis oleh tim pendukung. Dengan aplikasi ini, maka lebih cepat dalam tindaklanjuti aspirasi melalui RDP atau RDPU dengan *stakeholder* serta kementerian terkait. (*)

Senator M Nuh Minta BI Sumut Berkolaborasi dengan DPD RI



Anggota DPD RI Muhammad Nuh saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Didin Saputra

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Nuh melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut, Kamis (9/1/2025). Pada kesempatan itu, Muhammad Nuh menyampaikan pentingnya kolaborasi antara DPD RI dan BI Perwakilan Sumut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap program program yang telah dijalankan oleh BI di Sumut dapat dikolaborasikan dengan DPD RI, terutama untuk membantu masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus,” ujar Muhammad Nuh dalam

pertemuan dengan Kepala BI Perwakilan Sumut IGP Wira Kusuma didampingi Deputy Direktur Indra Kuspriyadi dan Deputy Perwakilan Suharman Tabrani.

Kepala BI Perwakilan Sumut IGP Wira Kusuma menjelaskan beberapa peran dan program strategis BI di Sumut yang meliputi pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi syariah. Selain mengatasi inflasi, Bank Indonesia juga memiliki tugas mendukung ekonomi syariah, seperti sertifikasi halal untuk UMKM, pendampingan UMKM, dan program pemberdayaan ekonomi pesantren.

Dia juga memaparkan sejumlah program sosial yang telah dilakukan BI di Sumut untuk masyarakat. “Kami baru-baru ini berkolaborasi dengan Dompot Dhuafa

dalam program pemberdayaan ekonomi, seperti beternak, pelatihan menjahit, dan operasi katarak gratis untuk masyarakat yang membutuhkan,” jelas IGP Wira.

Muhammad Nuh memberikan apresiasi atas inisiatif dan upaya yang telah dilakukan BI di Sumut. “Program program ini sangat bermanfaat dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini menjadi bukti nyata bahwa BI di Sumut berkomitmen mendukung pembangunan daerah,” ungkapnya.

Nuh pun berharap agar sinergi antara DPD RI dan BI terus ditingkatkan untuk memperluas dampak positif dari program yang dijalankan, khususnya bagi masyarakat terpencil yang berada di wilayah Sumatera Utara. (*)



DPD RI Siap Jembatani Aspirasi Daerah ke Pusat



Anggota DPD RI Muhammad Mursyid dalam kunjungannya ke Kabupaten Bengkalis. (Foto Humas Pemkab Bengkalis)

Arso P Nugroho

Penulis

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhammad Mursyid melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis, (9/1/2025). Senator dari daerah pemilihan Riau itu diterima Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, di Ruang Rapat Hangtuah Lantai 2 Kantor Bupati Bengkalis.

Dalam pertemuan tersebut, anggota DPD RI Muhammad Mursyid berdialog langsung dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai isu-isu strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan upaya pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi perhatian utama dalam dis-

“ Kami akan membawa berbagai masukan dari Kabupaten Bengkalis ini ke Senayan agar bisa menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional. Ini adalah bentuk kerja nyata kami untuk daerah. ”

**Anggota Komite I
DPD RI,
Muhammad Mursyid**

kusi tersebut.

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyampaikan apresiasi atas kunjungan senator itu dan juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk bekerja sama dengan DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bengkalis

di tingkat nasional.

Dia menaruh harapan besar kepada Senator Muhammad Mursyid, sebagai salah satu wakil daerah di tingkat pusat, dapat melihat dan menyerap serta menginventarisir berbagai aspirasi serta memberikan dukungan kepada kami untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. “Kami berharap anggota DPD RI dapat membantu memperjuangkan kepentingan masyarakat Bengkalis, terutama dalam bidang infrastruktur dan kesejahteraan sosial,” ujar Bagus.

Muhammad Mursyid menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pusat. Mursyid akan terus mendorong agar program-program yang diajukan pemerintah daerah ke pusat dapat terealisasi, khususnya dalam rangka mendukung kemajuan Kabupaten Bengkalis.

Mursyid menyampaikan komitmen untuk mende-ngarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Dia juga menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran. “Kami akan membawa berbagai masukan dari Kabupaten Bengkalis ini ke Senayan agar bisa menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional. Ini adalah bentuk kerja nyata kami untuk daerah,” kata Mursyid. (*)

Senator Wa Ode Rabiah Serap Aspirasi Diskepora Sultra



Anggota DPD RI Wa Ode Rabiah Al Adawia Ridwan bersama Kepala Diskepora Sulawesi Tenggara La Ode Daerah Hidayat. (Foto Haluansultra)

Adhi Nugroho

Penulis

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Wa Ode Rabiah Al Adawia Ridwan mengunjungi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Diskepora) Sulawesi Tenggara, Selasa (14/1/2025). Diterima langsung oleh Kepala Diskepora La Ode Daerah Hidayat.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPD RI untuk mendengarkan dan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah pemilihannya itu. Khusus di Diskepora terkait perkembangan olahraga dan kepemudaan di Bumi Anoa itu.

Kadispora kepada Senator

Wa Ode Rabiah menyampaikan Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki banyak atlet dan pemuda bertalenta yang kerap mengharumkan nama daerah. Khusus bidang olahraga, dia menaruh harapan agar Wa Ode Rabiah bisa menyuarakan terkait bantuan sarana dan prasarana olahraga. Misalnya, soal pembangunan asrama dayung yang tidak berlanjut.

“Jadi asrama dayung kita ini sudah pernah mendapat bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), namun terhenti. Kiranya ibu dewan bisa menyampaikan langsung ke pihak Kemenpora agar bisa dilanjutkan sehingga atlet kita bisa nyaman tinggal di asrama,” kata Kadispora.

Selain itu, dia juga menyampaikan cabang olahraga (ca-

bor) di Sultra yang sangat membutuhkan peralatan tanding dan ada yang telah dijanjikan saat perwakilan Kemenpora ketika hadir saat Pra Popnas. Misalnya, pengadaan ring tinju. “Semoga bisa disampaikan langsung. Dia berharap Sultra bisa menjadi prioritas untuk mendapat bantuan peralatan olahraga tersebut.

Wa Ode Rabiah berjanji menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Kadispora. “Setelah reses kami ada rapat kerja bersama Kemenpora. Nanti akan saya sampaikan semua terkait apa yang menjadi harapan dari Diskepora, mulai dari pembangunan asrama dayung yang mangkrak dan peralatan olahraga. *Insyallah* saya akan mengawal agar bisa terealisasi,” ujar Wa Ode Rabiah. (*)

Kunjungi Lapas Ketapang, Daud Yordan: Mereka Juga Manusia

Lela Sa'diah

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daud Yordan melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Selasa (7/1/2025). Permasalahan utama yang ditemukan di lapas itu adalah *over kapasitas*.

Terjadinya *over kapasitas* akan berdampak pada kebersihan, kesehatan, dan kelayakan tempat bagi warga binaan. Daud Yordan meminta warga binaan dan kepala lapas beserta jajaran untuk terus bersemangat dan bersabar. Dirinya akan mendukung dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi penghuni lapas tersebut.

“Ya, saya pikir mereka juga manusia. Jadi harus memang menjadi perhatian. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri, semoga menjadi atensi beliau dan cepat mendapat tanggapan,” kata anggota DPD RI dari Kalimantan Barat itu, setelah Kepala Lapas Kelas II B Ketapang menyampaikan kondisi lapas tersebut.

Kepala Lapas Kelas IIB Kabupaten Ketapang, Julius Barus, kepada Daud Yordan



Anggota DPD RI Daud Yordan saat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang, Kalimantan Barat. (Foto Istimewa)

menerangkan bahwa yang paling urgensi yang dihadapi lapas tersebut adalah *over kapasitas*. Dengan *over kapasitas* tidak maksimal memberikan pembinaan kepada warga binaan karena terbatasnya jumlah petugas lapas.

Karena itu, dia mengharapkan kepada Daud Yordan dapat mendukung pembangunan lapas di area belakang lapas untuk mengurangi *over kapasitas*. Selain itu, Julius berharap kepada Daud Yordan dapat mendukung terus lapas kelas IIB Kabu-

paten Ketapang, agar warga binaannya bisa terampil dan mempunyai kepribadian.

Pada kesempatan itu Daud Yordan memberikan apresiasi atas sambutan hangat oleh Kepala Lapas dan jajaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Ketapang. “Apa yang disampaikan hari ini dari kepala lapas dan teman-teman, kita akan sampaikan kepada Pak Menteri dan jajarannya atas persoalan *over kapasitas* yang terjadi,” ujar Daud Yordan. (*)

Senator Al Hidayat Soroti Rendahnya Gaji Dosen

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Dalam Sidang Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/1/2025), Al Hidayat Samsu dari Komite III DPD RI menyoroti masalah rendahnya gaji dosen di Indonesia. Beliau mengacu pada riset yang dilakukan oleh dosen dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Mataram (Unram) pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa 42 persen dosen negeri di perguruan tinggi negeri memiliki gaji di bawah Rp3 juta per bulan, sementara dosen di perguruan tinggi swasta memiliki penghasilan rata-rata tidak lebih dari Rp900.000 per bulan.

Al Hidayat mengkritik situasi ironis yang dihadapi oleh para dosen yang merupakan garda terdepan dalam pendidikan tinggi dan pilar esensial dalam penghasilan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Ia menunjukkan bahwa situasi ini kontras dengan harapan dan investasi pendidikan yang telah diberikan para dosen,



Anggota Komite III DPD RI Al Hidayat Samsu dalam Sidang Paripurna DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

banyak dari mereka menghabiskan biaya dan waktu untuk menyelesaikan pendidikan S2 dan S3.

Mengenai regulasi, Al Hidayat mengungkapkan bahwa peraturan terkait tunjangan kinerja dosen sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang diterbitkan melalui Perpres No.136/2018, Permendikbud No.49/2020, dan Keputusan Mendikbudristek No. 447/2024, belum diimplementasikan selama 12 tahun terakhir. Karena itu, Hidayat mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan nomenklatur dosen agar tunjangan kinerja yang tertunda dapat segera dicairkan.

Al Hidayat juga menyerukan perubahan sistem gaji dosen yang lebih sesuai

dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Selain itu, beliau menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan untuk memastikan bahwa kebijakan kenaikan gaji dosen memberikan dampak yang signifikan.

Menurutnya, adalah esensial untuk menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung kesejahteraan dosen, termasuk peningkatan tunjangan profesi. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dosen. (*)

Guru Harus jadi Teladan dan Disegani

Hestiana Kiftia Sari

Penulis

Seorang guru di salah satu sekolah swasta di Medan, Sumatera Utara, menghukum siswanya duduk di lantai selama 3 hari karena siswa yang bersangkutan menunggak pembayaran sekolah atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial dan mendapat kecaman dari masyarakat.

Menanggapi kasus tersebut, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menyangkan kejadian tersebut. “Kasus-kasus dalam dunia pendidikan kita hari ini adalah cerminan masa depan anak-anak Indonesia. Kita berharap, para guru menjadi contoh teladan di instansi pendidikan. Seorang guru bukan orang yang ditakuti, namun orang yang disegani dan disenangi karena karakternya,” kata Filep, Sabtu (11/1/2024).

Menurut Filep, persoalan masalah SPP tersebut tidak seharusnya terjadi karena pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membantu siswa yang kesulitan secara ekonomi. Substansi dana BOS yang diberikan pemerintah untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan, membantu siswa yang kurang mampu secara ekonomi.

“Sekolah swasta telah ditetapkan oleh pemerintah untuk bisa menerima dana BOS dengan persyaratan tertentu. Apakah SD Abdi Sukma Medan ini menerima dana BOS? Jika menerima, maka dana BOS itu sebenarnya dapat

digunakan untuk membantu siswa yang kurang mampu secara ekonomi,” tegas senator dari Papua Barat itu.

Filep juga menekankan bahwa substansi pendidikan di Indonesia seharusnya untuk perbaikan etika dan moral siswa. Hal itu harus sedemikian rupa dicontohkan oleh para pendidik di Tanah Air. Arah pendidikan adalah perbaikan karakter, pembinaan moral, dan pengembangan seluruh potensi siswa sehingga mampu menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.

“Karena itu, kita harus mewariskan pendidikan yang menguatkan mental para siswa, bukan menjatuhkan mentalnya. Saya berharap pendidikan dikembalikan kepada akar budaya bangsa yang menempatkan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal sebagai pijakannya. Bukan pendidikan yang kaku, tanpa toleransi,” tegasnya. (*)

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Pemkab Bengkalis Minta DPD RI Perjuangkan Jembatan 7 KM

Anggota DPD RI H Abdul Hamis meninjau lokasi pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Bengkalis dengan daratan Sumatera di Desa Pangkalan Batang. (Foto Humas Pemkab Bengkalis)

Helena GF Ojan

Penulis

Kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI H Abdul Hamis ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada Selasa (7/1/2025) membawa harapan besar bagi lokalitas tersebut. Diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra, di Ruang Rapat Hang Tuah, Kantor Bupati Bengkalis, pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai aspirasi pembangunan di Bengkalis yang hendak disampaikan ke pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Ersan menyampaikan beberapa prioritas pembangunan, termasuk pembangunan jembatan sepanjang 7 km yang direncanakan menghubungkan Pulau Bengkalis dengan

daratan Pulau Sumatera, di Kecamatan Bukit Batu. Jembatan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi lokal.

Selain itu, terdapat permintaan khusus terkait peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Rupat, yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia dan termasuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Ersan juga menekankan perlunya penanganan abrasi yang semakin meluas di pesisir Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.

“Kabupaten Bengkalis yang berfungsi sebagai penyangga pertahanan dan keamanan negara, dapat berkembang menjadi daerah kawasan perbatasan

negara yang maju dalam bidang infrastruktur, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ersan.

Menanggapi hal ini, Abdul Hamis menyatakan dukungannya untuk semua pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkalis. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi ini dalam rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.

Kunjungan diakhiri dengan peninjauan lokasi pembangunan jembatan di Desa Pangkalan Batang yang menandai langkah konkret dalam penghubungan Pulau Bengkalis dengan daratan Sumatera. Hal ini menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung dan merealisasikan aspirasi pembangunan Kabupaten Bengkalis. (*)



Dunia Diminta Aktif Awasi Gencatan Senjata Palestina-Israel

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung meminta komunitas internasional untuk aktif mengawasi gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Menurut Tamsil, gencatan senjata ini merupakan langkah penting bagi kemenangan perlawanan rakyat Palestina.

“Gencatan senjata ini tidak boleh menjadi sekadar formalitas. Serangan yang tetap berlanjut adalah bentuk pelanggaran berat yang menunjukkan bahwa penjajahan Israel harus segera dihentikan. Gencatan senjata adalah awal, bukan akhir dari perjuangan. Kita harus memastikan bahwa ini menjadi langkah menuju penghentian total penjajahan Israel di tanah Palestina,”

tegas Tamsil dalam keterangannya kepada media, Jumat (17/1/2025).

Tamsil menekankan meskipun gencatan senjata menjadi langkah positif, namun tantangan besar masih ada di depan. Proses diplomasi dan penyelesaian yang adil harus terus didorong untuk memastikan bahwa gencatan senjata bukan hanya sekadar penghentian sementara, tetapi sebuah langkah konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan bagi Palestina.

Dia menyambut baik langkah pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri yang menyampaikan dukungan terhadap gencatan senjata ini. Langkah ini sejalan dengan komitmen konstitusional Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. “Namun, kita juga harus

memastikan bahwa gencatan senjata untuk melindungi rakyat Palestina dan tidak digunakan sebagai jeda oleh Israel untuk terus memperkuat pendudukannya,” tambahnya.

Tamsil juga mendesak masyarakat internasional untuk tidak tinggal diam atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Setiap tindakan penjajahan harus dikutuk. Dunia internasional harus lebih berani mengambil langkah tegas untuk mewujudkan perdamaian yang adil.

“Persatuan komunitas internasional adalah kunci. Jika kita bersatu, kita tidak hanya mampu bersuara lantang, tetapi juga menciptakan solusi konkret untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina,” kata senator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu. (*)

Tukin Dosen ASN Harus Segera Dicairkan

Didin Saputra

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sudirman atau yang lebih diakrab disapa Haji Uma juga angkat bicara terkait tunjangan kinerja (tukin) dosen yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Sains Tek) yang belum dibayarkan selama lima tahun.

“Para dosen ASN di bawah Kemendikti Sains Tek sudah menjerit ini. Mereka melaporkan kepada saya bahwa hak tunjangan kinerja mereka tidak dibayar sudah lima tahun,” kata pria yang terkenal lewat peran antagonis di serial Eumpang Brueh ini kepada media Minggu, (19/1/2025).

Dia menyebut masalah tukin dosen ASN itu sudah dalam keadaan darurat. Dia menyebut hal tersebut telah mengabaikan hak-hak dosen ASN di Kemendikti Sains Tek, serta telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014, khususnya Pasal 80 tentang ASN terkait hal mendapatkan tukin, dan juga Peraturan Presiden Nomor 138 tahun 2015.

Menurut Haji Uma, alasan persoalan ketiadaan ang-



Anggota DPD RI Sudirman. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Ini harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu kinerja para pendidik di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kemendikti Sains Tek tidak boleh diam, serta harus memberikan transparansi bersama Kementerian Keuangan (Kemendiknas) ke publik.**”

Anggota DPD RI,
Sudirman

garan tentunya tidak relevan, karena dosen ASN di kementerian lain dibayarkan tukinnya, seperti di Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hanya Kemendikti Sains Tek yang tidak membayar.

“Ini harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu kinerja para pendidik di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kemendikti Sains Tek tidak boleh diam, serta harus memberikan transparansi bersama Kementerian Keuangan (Kemendiknas) ke publik,” tegas senator asal Aceh itu.

Haji Uma berharap supaya kesejahteraan dosen itu harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi masalah tukin sudah ditetapkan dalam undang-undang. Para dosen itu harus terjamin kualitas hidupnya. “Kalau pemenuhan haknya saja yang sudah ditetapkan undang-undang diamputasi, bagaimana mereka bisa tenang hidupnya?” kata Haji Uma. (*)

Pengawasan PMK Harus Diperketat

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mirah Midadan Fahmid menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak sapi masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Karena itu, Senator Mirah mendesak Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk terus memperketat pengawasan lalu lintas ternak sebagai langkah antisipatif. “Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hewan ternak yang akan dikirim keluar NTB dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK,” tegasnya, Sabtu (18/1/2025).

Senator Mirah menekankan bahwa langkah-langkah pengawasan ini harus terus ditingkatkan mengingat PMK adalah penyakit menular strategis yang dapat mengancam perekonomian peternak. Kesehatan ternak adalah kunci untuk menjaga kelangsungan hidup peternak dan keberlanjutan industri peternakan di NTB.

Dia mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh kepada Karantina di dae-



Anggota DPD RI Mirah Midadan Fahmid. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“**Kita harus membangun kesadaran di kalangan peternak tentang pentingnya kesehatan ternak mereka. Ini bukan hanya untuk melindungi usaha mereka, tetapi juga untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat luas.**”

Anggota DPD RI,
Mirah Midadan
Fahmid.

rah, termasuk NTB, dalam bentuk sumber daya dan teknologi agar pengawasan bisa dilakukan lebih efektif. Dalam konteks yang lebih luas, Mirah menekankan pentingnya edukasi kepada

peternak mengenai bahaya PMK dan langkah-langkah pencegahannya.

“Kita harus membangun kesadaran di kalangan peternak tentang pentingnya kesehatan ternak mereka. Ini bukan hanya untuk melindungi usaha mereka, tetapi juga untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat luas,” ujar Senator Mirah.

Dengan meningkatnya pengawasan, dia optimistis bahwa NTB bisa menjadi daerah yang bebas PMK. Menurut dia, ini langkah penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap produk ternak dari NTB. Dengan pengawasan yang ketat, bisa memastikan bahwa ternak yang keluar dari NTB adalah ternak yang sehat dan layak jual. (*)

Perlu Sinergitas DPD RI dengan Media di Daerah

Theresia Oktavina

Penulis

Sinergitas dan komunikasi yang intens perlu dilakukan antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan media massa di daerah sebagai saluran diseminasi informasi program kerja DPD RI. Oleh karena itu, Bagian Pemberitaan dan Media Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI memandang perlu dilakukan sinergitas dan komunikasi yang intens antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan media massa di daerah sebagai saluran diseminasi informasi program kerja DPD RI.

Sehubungan dengan itu, Bagian Pemberitaan DPD RI melakukan pertemuan dengan wartawan media daerah dan nasional di Provinsi Banten yang dihadiri pejabat Kantor DPD RI Provinsi Banten beserta jajarannya, Senin (16/12/2024).

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Banten, Hendri Jhon menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, selama ini kantor perwakilan Provinsi Banten jarang dikunjungi oleh wartawan. "Anggota DPD RI sudah biasa langsung berkomunikasi dengan media massa



Bagian Pemberitaan Biro PHM Setjen DPD RI berfoto bersama usai melakukan silaturahmi dengan wartawan di Banten. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

sendiri. Jadi kami sangat senang bisa bertemu dan berkenalan dengan media lokal di Provinsi Banten," ujar Hendri yang didampingi oleh Ahmad Jaelani, yang merupakan Kepala Subbagian Protokol, Komunikasi Publik, Data dan Informasi Kantor DPD RI Provinsi Banten.

Sementara itu, Arif Surahman, Perwakilan Pikiran Rakyat Wilayah Banten yang hadir dalam pertemuan itu, mengatakan bahwa ia siap menjembatani dan akan mendayagunakan potensi wartawan untuk mendukung penyebaran informasi DPD RI.

"DPD RI dan media di Banten bisa bersinergi untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Dulu belum ada, semoga sekarang de-

ngan kepemimpinan yang baru ada perubahan penyebaran informasi baik konvensional maupun digital, untuk DPD di Banten khususnya dan di pusat juga," jelas Arif.

Kepala Subbagian Pemberitaan Setjen DPD RI Budi Fitra Helmi yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik dalam rangka penyebaran informasi kinerja DPD RI. "Selain meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan media lokal di daerah, Bagian Pemberitaan dan Media Setjen DPD RI juga ingin mengetahui perspektif media lokal terhadap pemberitaan DPD RI tahun 2024," jelas Budi. (*)



Larasati Moriska

Betria Eriani

Penulis

Larasati Moriska terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, mencatatkan diri sebagai anggota termuda di periode 2024-2029. Pada usia 22 tahun, ia telah menyelesaikan studi di bidang bisnis di Universitas Prasetya Mulya, Tangerang. Larasati tidak hanya mencetak sejarah karena usianya, tetapi juga karena keberanian dan ide-idenya yang diharapkan membawa angin segar dalam politik Indonesia.

Sebagai anak dari Asni Hafid dan Nardi Aziz, Larasati memiliki latar belakang keluarga yang kuat dalam politik. Ayahnya, Nardi, adalah mantan Ketua DPRD Nunukan, sementara ibunya, Asni, adalah senator DPD RI dari Kalimantan Utara. Dari kedua orangtuanya, Larasati mewarisi semangat pelayanan publik dan komitmen terhadap pembangunan daerahnya, Kalimantan Utara.

Saat dilantik, Larasati juga terpilih sebagai pimpinan sementara DPD dan MPR RI, di mana ia menjabat sebagai wakil ketua. Dia mendampingi Ismeth Abdullah, Ketua sementara dan anggota tertua di DPD RI asal Kepulauan Riau dalam memimpin agenda pengucapan sumpah janji anggota DPD RI masa jabatan 2024-2029. Kepemimpinan Larasati menjadi jembatan generasi, menghubungkan aspirasi muda dengan pengalaman lama dalam politik.

Selain itu, Larasati juga disebut sebagai tokoh muda yang memiliki visi yang kuat untuk penguatan representasi Kalimantan Utara di tingkat pusat. Karier politiknya yang gemilang di usia muda menggambarkan kepercayaan masyarakat

terhadap kapabilitasnya dalam memahami dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi daerahnya. Sebagai representasi Generasi Z, ia membawa harapan baru bagi pembaharuan politik di Indonesia.

Sebagaimana dikutip dari laman Tempo.co, keterlibatan Larasati dalam politik bukan hanya soal usia, tetapi lebih tentang membawa ide-ide baru, semangat, dan keberanian untuk melakukan perubahan nyata bagi bangsa dan negara. Kehadirannya di Parlemen diharapkan bisa menjadi langkah awal bagi lebih banyak anak muda untuk terlibat aktif dalam kancah politik.

Sebagai pimpinan sementara DPD/MPR RI, Larasati memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan jalannya sidang berlangsung dengan lancar dan khidmat. Tugas ini sangat krusial, sebab sidang tersebut akan menjadi momen penting bagi seluruh anggota DPD/MPR RI untuk berkomitmen dalam menjalankan tugas mengawal kepentingan daerah masing-masing. Melalui kepemimpinan dan dedikasinya, Larasati berharap dapat membantu memastikan bahwa semua suara di Indonesia, terutama dari daerah terpencil, dapat terdengar dengan jelas di tingkat nasional. (*/Sumber: Tempo.co)

Foto Tempo.CO

R. Graal Taliawo

Arso P Nugroho

Penulis

R Graal Taliawo, lahir pada 20 Agustus 1987 di Desa Wayaua, Bacan, Halmahera Selatan, memiliki latar belakang keluarga yang perhatian dalam pendidikan dan nilai-nilai masyarakat. Ayahnya, Sefnat Taliawo, seorang guru SD dari Desa Buo, Loloda (Halmahera Barat), dan ibunya, Dewi Tiboya (alm.), berasal dari desa yang sama dengan Graal. Mendapatkan pendidikan dasar di Halmahera Selatan, ia melanjutkan studi menengah pertamanya di Kota Ternate sebelum pindah ke Kota Blitar untuk menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, lulus pada tahun 2005. Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Universitas Merdeka Malang, mendapatkan gelar S.Sos. dalam Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2009.

Selama masa studinya, Graal aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan komunitas kristiani, yang menunjukkan kepemimpinan dan dedikasinya terhadap masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia memulai karirnya di sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jakarta pada tahun 2010 dan kemudian melanjutkan studi S2 Sosiologi di Universitas



Foto Dokpri

Indonesia, lulus pada Februari 2014. Pengalamannya sebagai Tenaga Ahli di DPR Papua dan DPR-RI membentuk pemahamannya tentang kebutuhan politik dan sosial di Indonesia.

Dr. Graal Taliawo memutuskan untuk melanjutkan studi doktoralnya di bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia, yang ia selesaikan pada tahun 2022. Dengan pengalaman luas baik di dalam maupun di luar negeri, ia mendedikasikan dirinya di dunia politik dengan visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara melalui pengembangan sektor perikanan, pertanian serta perkebunan.

Dalam kariernya, Graal telah menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas dan pemberdayaan masyarakat. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

RI untuk periode 2024-2029 dari Maluku Utara, setelah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024. Pendekatan politiknya yang berbasis pada gagasan dan ide, bukan transaksi, menunjukkan pendirian yang jelas terhadap anti-korupsi dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan.

Dr. Graal menekankan pentingnya modernisasi dan industrialisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia percaya bahwa peran politiknya bukan hanya sebagai pembuat kebijakan tetapi juga sebagai pemimpin yang menginspirasi dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Komitmen Dr. Graal Taliawo untuk melayani dan melayani masyarakat Maluku Utara tercermin dalam setiap aspek pekerjaannya, berlandaskan pada keyakinan kuat dalam nilai-nilai pelayanan, keadilan, dan persamaan. Dengan semangat yang tak kunjung padam, ia berjanji untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung perkembangan daerahnya, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. (*/berbagai sumber)

Batik Motif Dayak Latar Gringsing

Mas Aryo Kristiyanto

Penulis

Batik Motif Dayak Latar Gringsing merupakan ekspresi artistik dari suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, Indonesia, yang kaya akan nilai dan filosofi. Motif ini tidak hanya menampilkan corak pada kain, tetapi juga mencerminkan kepercayaan, tradisi, dan cara hidup masyarakat Dayak. Teknik pewarnaan tradisional yang digunakan adalah “ikat celup”, di mana benang diikat dan dicelupkan sebelum dite-nun, menciptakan pola yang kompleks dan simetris. Menurut Profesor Richard K. Scott, seorang etnografer yang telah melakukan penelitian mendalam tentang budaya Dayak, teknik ini juga merupakan bentuk pelestarian kebudayaan yang penting di tengah arus modernisasi (Scott, 2021).

Sejarah Batik Dayak Latar Gringsing erat kaitannya dengan kepercayaan suku Dayak terhadap dunia spiritual dan alam semesta. Dalam kepercayaan mereka, setiap motif memiliki fungsi lebih dari sekadar hiasan, seperti perlindungan dari roh jahat atau sebagai media meditasi. Corak Gringsing, yang berarti “tidak sakit” dalam bahasa setempat, dipercaya memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemakainya dari penyakit dan malapetaka. Ini menunjukkan betapa dalamnya makna spiritual yang terkandung dalam



(Ilustrasi batik tradisional indonesia)

setiap motif yang diciptakan oleh masyarakat Dayak (Scott, 2021).

Motif ini juga mengalami pasang surut dalam pengembangannya, menyesuaikan dengan perubahan zaman. Meskipun pada awalnya teknik dan motif ini hanya diajarkan secara turun-temurun dalam komunitas Dayak, kini telah mulai dikenal luas dan dikembangkan oleh berbagai kalangan di luar suku Dayak. Hal ini membantu pelestarian budaya tetapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti isu hak cipta dan komersialisasi yang dapat mengaburkan nilai autentisitas dan filosofis dari batik asli (Scott, 2021).

Filosofi di balik Batik Dayak Latar Gringsing juga mencerminkan pandangan suku Dayak terhadap alam. Motif yang dihasilkan sering kali menggambarkan flora dan fauna serta elemen-elemen alam lain yang dianggap sakral. Hal ini menunjukkan penghormatan dan keharmonisan yang tinggi

terhadap alam, yang merupakan prinsip penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Elemen-elemen alam ini tidak hanya dijadikan sebagai dekorasi tetapi juga sebagai simbol dari siklus kehidupan dan interdependensi antara manusia dan alam (Scott, 2021).

Saat ini, Batik Dayak Latar Gringsing telah menjadi simbol kebanggaan dan identitas bagi masyarakat Dayak. Pengrajin batik Dayak terus berupaya mempertahankan keaslian dan kualitas dalam setiap produksi batiknya, sambil secara bertahap mengadaptasi teknik mereka agar lebih dikenal dan dapat diterima di pasar modern. Melalui batik ini, suku Dayak tidak hanya berhasil mempertahankan warisan budaya mereka tetapi juga mengkomunikasikan nilai-nilai mereka kepada dunia luar, mengajarkan pentingnya menghargai dan memelihara keberagaman budaya dan alam (Scott, 2021). (*/berbagai sumber)

Dayak Latar Gringsing Batik Pattern

Mas Aryo Kristiyanto

Writer

The Dayak Latar Gringsing Batik pattern, which is rich in artistic value and philosophy, is an artistic expression of Dayak tribes who are populating Kalimantan Island, Indonesia. The motif does not only exhibit decorative pattern upon the cloth but it also reflects the belief, tradition, and way of living of Dayak people. The traditional dying technique used is “ikat celup” (tied dying), where the threads are tied and dyed prior to be weaved, creating an intricate and symmetrical pattern. According to Professor Richard K. Scott, an ethnographer who has done deep research about Dayak’s culture, the technique also serves as essential culture preservation in the midst of modernization wave (Scott, 2021).

The history of the Dayak Latar Gringsing Batik is closely related to Dayak tribe’s belief toward spiritual realm and the universe. In their belief, each motif serves more purpose than just an ornament, such as protection from evil spirit or as meditation media. Gringsing pattern, which means ‘no pain’ in local dialect, is believed to possess supernatural power to protect the wearer from diseases and calamities. This indicates how profound the spiritual meaning contained in every motif created by Dayak people (Scott, 2011).

The motif has also endured its ups and downs in its development while adapting to changing of times. Despite originally the technique and the motif were only taught from generation to generation within Dayak community, today they are widely known and developed by various circles outside the Dayak tribe. This helps the preservation of the culture while at the same time creates new challenges such as copyright and commercialization issues which may obscure the authenticity and philosophical value of the genuine batik (Scott, 2021)



(Illustration: Pinterest)

The philosophy of Dayak Latar Gringsing Batik also reflects the perception of Dayak tribe about nature. The motif production frequently depicts flora and fauna objects as well as other perceptively sacred nature elements. It shows high respect and harmony toward nature which are essential principles in the life of Dayak community. These nature elements are not only made as decoration but also used as symbols of life cycle and interdependence of man and nature (Scott, 2021).

Today, the Dayak Latar Gringsing Batik has become proudful symbol and identity for Dayak community. Craftsmen of Dayak batik keep endeavouring to maintain the authenticity and quality of every batik product, while gradually adapting their technique in order to get more exposure and acceptance in modern markets. Through this batik, Dayak tribe is successful not only to keep their cultural heritage but also communicate their values to outside world, i.e. educating the importance of respect and care for diversity of culture and nature (Scott, 2021). (*/various sources)



(Aturin.com)

Didin Saputra

Penulis

Air Terjun Sendang Gile, yang tersembunyi di dalam kehijauan Taman Nasional Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu keajaiban alam yang paling memukau di Indonesia. Terletak di desa Senaru, air terjun ini adalah pintu gerbang yang menarik bagi mereka yang ingin mengeksplorasi keindahan alam Lombok. Dengan ketinggian yang mencapai sekitar 600 meter di atas permukaan laut, Air Terjun Sendang Gile menawarkan pemandangan yang spektakuler dan suasana yang menyegarkan.

Perjalanan menuju air terjun ini sendiri adalah sebuah petualangan. Pengunjung akan melewati jalur setapak yang dikelilingi

oleh keanekaragaman flora dan fauna, menyusuri anak tangga yang terbuat dari batu, dan melintasi jembatan bambu. Suara gemericik air dan kicauan burung semakin menambah keasrian suasana, membuat setiap langkah terasa semakin dekat dengan alam.

Sesampainya di lokasi, pengunjung akan disambut oleh derasnya air terjun yang jatuh dari ketinggian, membentur batu dan menciptakan kabut air yang menyejukkan. Kolam alami yang terbentuk di bawah air terjun menjadi tempat yang sempurna untuk berendam dan menikmati kesegaran air pegunungan. Sinar matahari yang menembus celah-celah daun menciptakan efek cahaya yang memukau, menambah keindahan pemandangan alam sekitar.

Air Terjun Sendang Gile tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga cerita dan legenda setempat

yang mengiringi keberadaannya. Konon, air terjun ini merupakan tempat persembunyian bagi para putri kerajaan yang ingin menyepi dari keramaian istana. Cerita-cerita rakyat tersebut semakin memperkaya pengalaman pengunjung, seolah-olah memasuki dunia lain yang penuh misteri dan pesona.

Bagi para pencinta alam dan petualangan, Air Terjun Sendang Gile adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Lombok. Selain menikmati keindahan air terjun, pengunjung juga dapat melakukan trekking lebih lanjut ke Air Terjun Tiu Kelep yang tidak jauh dari lokasi, menambah daftar kegiatan yang bisa dilakukan di kawasan ini. Dengan semua keistimewaannya, Air Terjun Sendang Gile tampil sebagai simbol keindahan alam Indonesia yang autentik dan mempesona. (*)

Sendang Gile Waterfall

Didin Saputra

Writer

Hidden within the green trees of National Park of Rinjani Mountain, West Nusa Tenggara, Sendang Gile waterfall is amongst the most enchanting wonders of nature in Indonesia. Located in Senaru village, the waterfall is an attractive entrance to those who intend to explore the nature beauty of Lombok. With the height about 600 meter above sea level, Sendang Gile waterfall offers spectacular scenery and fresh air.

The trekking to the waterfall itself is an adventure. Visitors will have to walk through footpath surrounded by diversity of flora and fauna, climb up stone-made steps, and cross over bamboo bridge. The gargling sound of water and the chirping sound of birds add to the nature beauty of the surrounding, prompting every step admittedly closer and closer to nature.

Upon arriving at the location, visitors will be welcome by the roaring sound of the waterfall from the height, hitting stones and creating refreshing fogs. The natural pool formed beneath the waterfall turns into a perfect spot to wallow in and enjoy the fresh mountain water. The sunshine peeking through thick leaves creates



CekTripLombok)

an enchanting colour spectrum, adding more toward the beauty of the surrounding nature.

Sendang Gile waterfall does not only offer nature beauty, but also its related story and legend. It is said that the waterfall was a hidden escape for princess of the kingdom who wished to be secluded from the hectic kingdom activities. These folktales enrich even more to the experience of visitors, as if they entered into different world

full of mystery and charm.

To nature and adventure lovers, Sendang Gile waterfall is a must-visit destination when travelling in Lombok. Besides enjoying the beauty of the waterfall, visitors can do further trekking to Tiu Kelep waterfall which is located nearby, adding more to the to-do-list within the area. With all its special attributes, Sendang Gile waterfall poses itself as authentic and fascinating nature beauty symbol in Indonesia. (*)

Air Terjun Berambai

M Fathoni

Penulis

Air Terjun Berambai, tersembunyi di jantung Kalimantan Timur, adalah sebuah keajaiban alam yang belum banyak terjamah. Terletak di Kabupaten Kutai Barat, air terjun ini menawarkan panorama alam yang memukau dengan air yang jernih memancar dari ketinggian hampir 75 meter, membentuk kabut halus yang menyegarkan di sekitarnya. Suara gemericik air yang jatuh mengalir tenang, menciptakan suasana damai yang sempurna bagi siapa saja yang mengunjunginya.

Untuk mencapai Air Terjun Berambai, pengunjung harus melakukan perjalanan yang tidak ringan. Akses ke lokasi ini bisa dibilang petualangan tersendiri, memerlukan perjalanan darat dan sedikit trekking melalui jalur hutan yang masih asri. Dari kota terdekat, Tenggarong, perjalanan memakan waktu sekitar dua hingga tiga jam dengan kendaraan. Selanjutnya, pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalur setapak yang melewati hutan hujan tropis Kalimantan, dimana mereka bisa menyaksikan keanekaragaman flora dan fauna lokal.

Saat tiba di lokasi, keindahan alam Air Terjun Berambai langsung terasa. Air terjun ini memiliki beberapa tingkatan dengan kolam alami di dasar-



(Wisato.Id)

nya yang bisa digunakan untuk berenang. Airnya yang dingin dan jernih sangat menyegarkan, terutama setelah melakukan perjalanan panjang dan melelahkan. Lingkungan di sekitar air terjun dipenuhi dengan berbagai jenis pohon besar dan tanaman hijau yang memberikan nuansa asri dan alami.

Aktivitas yang bisa dilakukan di Air Terjun Berambai tidak hanya terbatas pada berenang. Pengunjung juga bisa melakukan piknik di sekitar area, trekking lebih jauh untuk mengeksplorasi keindahan alam sekitarnya, atau sekedar duduk dan menikmati keheningan alam. Tempat ini sangat cocok bagi para pecinta alam yang ingin menyepi dari keramaian dan rutinitas sehari-hari.

Fasilitas di Air Terjun Berambai masih sangat sederhana,

mengingat lokasinya yang cukup terpencil. Namun, ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk benar-benar terhubung dengan alam. Beberapa penginapan dasar dan area berkemah tersedia bagi mereka yang ingin menghabiskan malam, menikmati suasana hutan di malam hari.

Kunjungan ke Air Terjun Berambai menawarkan pengalaman yang unik dan mengesankan. Dengan keindahan alamnya yang masih alami, air terjun ini adalah destinasi yang ideal bagi mereka yang mencari ketenangan, petualangan, dan kesempatan untuk terhubung kembali dengan alam. Ini adalah surga tersembunyi yang menanti untuk dijelajahi oleh lebih banyak pengunjung yang berani menempuh perjalanan ke dalam hati Kalimantan. (*)



(Wisato.Id)

M Fathoni

Author

Berambai waterfall, hidden in the heart of East Kalimantan, is a nature wonder which is least exploited. Located in West Kutai Regency, the waterfall offers enchanting nature panorama with its clear water splattering from almost 75-meter height, forming fresh thin mist all around. The gargling sound of falling water flowing calmly produces perfect tranquillity to whosoever visiting the place.

To reach Berambai waterfall, visitors have to take not-an-easy path. The access to the location is practically an adventure itself, as it requires journey on land and a little trekking through a virgin forest path. From the nearest city, Tenggarong, it takes approximately two to three hours

by vehicle. After that visitors must take a walk along the footpath through tropical rainforest of Kalimantan where they can enjoy the view of diversity of local flora and fauna.

Upon arriving in the location, the nature beauty of the waterfall becomes tangible. It has several tiers with natural pool at the base suitable for swimming. The water is refreshing cold and clear, especially post having a long tiring journey. The surrounding of the waterfall is full of all kinds of big trees and green plants which provide fresh and natural nuance.

Activities practicable around Berambai waterfall is not only limited to swimming. Visitors can have a picnic in the surrounding area, go for further trekking to explore the surrounding nature beauty, or simply sit and enjoy nature

tranquillity. The place is suitable for nature lovers who seek seclusion from crowded daily routine.

The facility in Berambai waterfall is pretty simple due to its remote location. Nevertheless it gives opportunity to visitors to really get in touch with nature. Several basic lodgings and camping ground are available for those who would like to spend the night there, while enjoying forest situation during the night.

A visit to Berambai waterfall offers a unique and memorable experience. With its virgin nature beauty, it is an ideal destination to those who seek for tranquillity, adventure, and opportunity to reconnect with nature. It is a hidden paradise awaiting to be explored by more visitors who dare to take a journey into the deep of the heart of Kalimantan. (*)

Gurihnya Ayam Lodho Trenggalek

Fandi Tri Prayogo

Penulis

Ayam Lodho merupakan hidangan khas yang berasal dari Trenggalek, Jawa Timur. Hidangan ini terkenal dengan cita rasanya yang kaya akan rempah. Proses pembuatannya yang unik memberikan karakteristik tersendiri pada rasa ayam. Ayam kampung yang digunakan dalam Ayam Lodho terlebih dahulu dibakar hingga kecokelatan sehingga aroma bakarannya begitu khas dan menggugah selera.

Setelah proses pembakaran, ayam tersebut kemudian dimasak lagi dengan bumbu kuning dan santan yang kental. Bumbu kuningnya terbuat dari kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan rempah lain yang dihaluskan dan ditumis hingga harum. Penambahan santan tidak hanya membuat saus menjadi kaya rasa, tetapi juga memberikan tekstur yang lembut pada daging ayam. Campuran rempah-rempah tersebut tidak hanya menghasilkan aroma yang memikat tetapi juga rasa yang mendalam dan berlapis.

Pada awalnya, Ayam Lodho hanya disajikan dalam acara-acara besar dan hari raya di Trenggalek. Hidangan ini dianggap sebagai simbol perayaan dan keramahtamahan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Ayam Lodho kini dapat dinikmati oleh lebih banyak orang dan hadir di berbagai warung makan setiap hari. Transformasi ini membantu menyebarkan kelezatan Ayam Lodho ke berbagai kalangan.

Salah satu keunikan dalam penyajian Ayam Lodho adalah cara penyajiannya yang masih tradisional. Ayam yang telah dimasak dengan santan dan bumbu kuning disajikan dalam piring atau wadah yang sederhana, seringkali ditemani nasi hangat atau lontong sebagai pelengkap. Penyajian ini tidak hanya menonjolkan rasa dari ayam itu sendiri tetapi juga kesederhanaan dan keaslian dari masakan tradisional Jawa.

Aspek yang paling disukai banyak orang dari Ayam Lodho adalah perpaduan rasa gurih dari santan dan rempah-rempah yang kuat. Harga yang terjangkau, yaitu berkisar antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per porsi, membuat hidangan ini menjadi pilihan menarik bagi para penikmat kuliner di Indonesia. Tidak heran jika Ayam Lodho kini semakin populer dan menjadi favorit bagi banyak orang.

Mengenal lebih jauh tentang Ayam Lodho tidak hanya membuka wawasan mengenai kekayaan kuliner Indonesia, tetapi juga mengajak kita mengapresiasi proses pembuatan dan sejarah di balik makanan tradisional tersebut. Ayam Lodho bukan sekedar hidangan, melainkan cerminan dari budaya dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Jawa Timur. (*)

(Foto Kompas.com)



ME
NU

The Savoury Trenggalek Lodho Chicken

Fandi Tri Prayogo

Writer

Lodho chicken is a special dish from Trenggalek, East Java. The dish is famous for its spice-rich taste. The unique making process produces typical characteristics to the taste of the chicken. The Domestic chicken used for Lodho chicken is first grilled until it turns brownish and produces typical mouth-watering aroma.

Having been grilled, the chicken is then re-cooked with yellow seasoning and thick coconut milk. The yellow seasoning is made of turmeric, ginger, shallots, garlic, and other spices which are finely ground and sautéed till it smells nice. The adding of coconut milk does not only make the sauce become rich in taste, but also gives soft texture to the chicken meat. The mixture of those spices does not only produce enticing aroma but also create deep and layering taste.

Originally, Lodho chicken is only served for main events and celebration in Trenggalek.

The dish is considered as celebration

and courtesy symbol. Nonetheless as time goes by, Lodho chicken can eventually be enjoyed by many more people and be served in ordinary eateries. This transformation helps spreading the savoury of Lodho chicken to various circles.

One of the uniqueness in serving Lodho chicken is that it is still done traditionally. Once cooked with coconut milk and yellow seasoning, it is served in simple plate or container, oftentimes with warm rice or rice cake as its complement. The serving highlights not only the taste of the chicken but also the simplicity and authenticity of traditional Javanese cuisine.

The most favourite aspect of the chicken to many people is the combination of its savoury taste from the coconut milk and the rich spices. With its reasonable price, i.e. around Rp.25.000,- to Rp.35.000,- per portion, does the dish become attractive choice to culinary lovers in Indonesia. No wonder Lodho Chicken has become more and more popular and the favourite of many people.

To understand further about Lodho chicken does not only open the insight of Indonesian culinary delight heritage but it also invites us to appreciate the making process and historical background behind the traditional dish. Lodho chicken is not just another dish, rather it is the reflection of life culture and tradition of East Java people.

(*)

(Photo : Kabar Trenggalek)

Enaknya Kopi Gayo, Aceh

Theresia Oktavina

Penulis

Kopi Gayo dari Aceh merupakan salah satu jenis kopi terbaik yang diakui secara internasional. Kopi ini berasal dari dataran tinggi Gayo di provinsi Aceh, Indonesia, yang terkenal dengan kondisi geografisnya yang ideal untuk pertumbuhan biji kopi berkualitas tinggi. Kopi Gayo memiliki cita rasa yang khas dengan karakter rasa yang kompleks; kombinasi antara rasa manis buah-buahan, sedikit rasa herbal, dan *after-taste* yang tahan lama. Selain itu, tekstur kopi ini juga unik, sering digambarkan sebagai tebal dan kaya.

Proses pembuatan kopi Gayo ini dimulai dari pemilihan biji kopi hanya yang terbaik. Petani kopi di Aceh menggunakan metode bertani tradisional, di mana mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan bahan kimia sintetis, menjadikan Kopi Gayo sebagai produk organik yang sangat dihargai. Setelah panen, biji kopi diolah dengan metode basah atau kering. Metode basah, yang sering digunakan, melibatkan fermentasi biji kopi yang sudah dibersihkan dan pencucian berturut-turut sebelum akhirnya dikeringkan di bawah sinar matahari.



(Ilustrasi diKemas.com)

Sejarah kopi di Aceh sangat kaya dan telah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Menurut catatan sejarah, kopi pertama kali dibawa ke Aceh oleh pedagang-pedagang Arab pada abad ke-17. Sejak saat itu, kopi telah menjadi bagian penting dari ekonomi dan budaya Aceh. Kopi Gayo khususnya, menjadi sangat terkenal di kalangan penikmat kopi dunia setelah wilayah ini memperoleh sertifikat geografis yang membantu meningkatkan reputasinya sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia.

Pada era globalisasi saat ini, kopi Gayo telah berhasil menembus pasar internasional dan menjadi favorit di kalangan peminum kopi di banyak negara. Strategi pemasaran yang efektif serta kualitas kopi yang tinggi telah membuat kopi ini tidak hanya populer di dalam ne-

geri, tetapi juga di luar negeri. Kerjasama antara petani, pemerintah lokal, dan berbagai lembaga non-pemerintah telah memainkan peran penting dalam promosi dan distribusi kopi Gayo.

Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh petani kopi Gayo, seperti perubahan iklim yang mempengaruhi pola hujan dan suhu, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kualitas biji kopi. Oleh karena itu, pendekatan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kopi Gayo bisa terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Selain itu, dukungan terus menerus dari semua pihak akan memastikan bahwa kopi Gayo tetap menjadi kebanggaan Indonesia di kancah dunia. (*)

The Delight of Gayo Coffee, Aceh

Theresia Oktavina

Author

Gayo coffee of Aceh is one of the best coffees acknowledged internationally. It originates from Gayo highland in Aceh Province, Indonesia which is well-known for its ideal geographical condition suitable for high-quality coffee seed farming. Gayo coffee has typical taste with complex characteristic, i.e. the combination of sweet taste of fruit, a slight herbal taste, and a lasting aftertaste. Besides, the seed texture is also unique, commonly depicted as thick and rich.

The making process of Gayo coffee starts with only the best-seed-selection. Aceh coffee farmers use traditional farming method where they would rather decline the use of synthetic chemical material thus causes it as a very appreciated organic product. Post-harvest, the seeds are processed on wet or dry methods. The wet method, more frequently used, involves fermenting the coffee seeds that have been cleansed under multiple washes and eventually dried off under the sun.

The history of coffee in Aceh is very rich, beginning hundreds of years ago. According to the historical



(Photo by Antara.com)

record, the coffee was first brought to Aceh by Arabian traders in the 17th century. Since then, coffee has become important part of Aceh's economy and culture. Gayo coffee, especially, has become very famous among coffee lovers all over the world post the area receiving its geographical certificate which enhances its reputation as one of the best coffee producers in the world.

In the global era, Gayo coffee has successfully penetrated international market and become favorite choice among coffee lovers in many countries. The effective marketing strategy and the high quality of the coffee have made it popular not only domestically but also internationally. The coop-

eration between farmers, local government and diverse non-government organizations has played key roles in promoting and distributing Gayo coffee.

Yet behind the success story, there are major challenges faced by Gayo coffee's farmers, such as climate change that affects raining patterns and temperatures which can eventually affect the quality of the coffee seeds. Therefore, sustainable approach and adaptation toward environmental changes are very essential to ensure that Gayo coffee can continually be enjoyed by the next generation. In addition to that, the support of all parties will ascertain that Gayo coffee remains being the pride of Indonesia in the world stage. (*)

Ketahanan Nasional Prasyarat Indonesia Emas 2045

Oleh:

Aanya Rina Casmayanti, Anggota Komite I DPD RI

Setelah merefleksikan perjalanan bangsa di tahun lalu, saatnya kita menyongsong era baru. Langkah pertama dan yang paling utama adalah membangun ketahanan nasional sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Sebagai negara dengan keberagaman dan dinamika global yang tinggi, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji stabilitas dan persatuan bangsa.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah tujuan bersama, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Namun, untuk mewujudkan visi tersebut, ketahanan nasional harus diletakkan sebagai prioritas utama. Tanpa ketahanan nasional yang kokoh, ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, dan pembangunan bangsa dapat menggagalkan cita-cita besar kita.

Ketahanan Nasional sebagai Fondasi

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Ada beberapa pilar ketahanan nasional yang perlu menjadi perhatian kita bersama:

1. Ketahanan Ideologi
Pancasila sebagai dasar negara harus terus

dijaga dari ancaman ideologi transnasional yang dapat merusak persatuan bangsa. Upaya penguatan ideologi ini perlu dimulai dari pendidikan hingga kebijakan yang inklusif.

2. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi menjadi penopang utama menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan sektor strategis, ketahanan pangan, dan kemandirian energi menjadi prioritas yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berkelanjutan.

3. Ketahanan Sosial-Budaya

Keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa yang harus dirawat dengan sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Ketahanan sosial-budaya yang kuat menjadi tameng dari ancaman disintegrasi.

4. Ketahanan Keamanan

Stabilitas keamanan di tingkat lokal dan nasional harus terus dijaga, termasuk menghadapi ancaman keamanan non-tradisional seperti kejahatan siber yang kian meningkat.

Tantangan dan Peluang

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang ada. Ketimpangan ekonomi antardaerah, ancaman polarisasi politik, serta dampak globalisasi





Ilustrasi NNC Netralnews

menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi strategis. Namun, Indonesia juga memiliki modal besar berupa bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan posisi strategis di kancah internasional.

Rekomendasi Strategis

Sebagai Anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan ketahanan nasional, saya menilai bahwa beberapa langkah strategis perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional:

1. Penguatan Pendidikan Berbasis Kebangsaan

Pendidikan harus menjadi sarana menanamkan nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda.

2. Pengembangan Teknologi dan Inovasi

Pemerintah harus mendorong penguasaan teknologi untuk memperkuat daya

saing nasional, terutama di sektor strategis seperti energi dan pangan.

3. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Ketahanan nasional harus diwujudkan melalui kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu-isu strategis, termasuk pengelolaan sumber daya dan keamanan wilayah.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Ketahanan nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan bangsa harus terus dibangun melalui berbagai program dan inisiatif masyarakat.

Penutup

Ketahanan nasional adalah prasyarat utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan memperkuat fondasi ini, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada, sekaligus memanfaatkan peluang besar yang dimiliki bangsa ini. (*)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Selamat Memperingati

Gong Xi Fa Cai

Happy Chinese New Year

2025

29 Januari 2025



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI

